PERAN GREENPEACE INDONESIA DALAM ISU LINGKUNGAN DI RAJA AMPAT TAHUN 2022 - 2025

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

M. DAFFA ABDULLAH

22323062

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

PERAN GREENPEACE INDONESIA DALAM ISU LINGKUNGAN DI RAJA AMPAT TAHUN 2022 - 2025

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

M. DAFFA ABDULLAH

22323062

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN GREENPEACE INDONESIA DALAM ISU LINGKUNGAN DI RAJA AMPAT TAHUN 2022 - 2025

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
13 April 2026

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
YOGYAKARTA

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.	
2	Hadza Min Fadhli Robby S.I.P., M.Sc.	
3	Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.	

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan diterbitkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 April 2026
Penulis,



M. Daffa Abdullah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBAR viii

ABSTRAK ix

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.3 Tujuan Penelitian 8

1.4 Cakupan penelitian 9

1.5 Tinjauan Pustaka 9

1.6 Kerangka Pemikiran 12

1.7 Argumen Sementara 14

1.8 Metode Penelitian 15

1.8.1 Jenis Penelitian 15

1.8.3 Metode Pengumpulan Data 16

1.8.4 Proses Penelitian 16

1.9 Sistematika Pembahasan 16

BAB 2 ISU LINGKUNGAN DI RAJA AMPAT 17

2.1. Problematika Isu Lingkungan di Raja Ampat 17

2.2 Solusi Problematika Isu Lingkungan di Raja Ampat 28

2.3 Greenpeace Indonesia di Raja Ampat 37

BAB 3 PERAN GREENPEACE INDONESIA DALAM ISU LIGKUNGAN DI RAJA AMPAT 41

3.1. Peran Greenpeace Indonesia sebagai *Service Delivery/implementers* 41

3.2 Peran Greenpeace Indonesia sebagai *Catalyst* 44

3.3 Peran Greenpeace Indonesia sebagai *Partnership* 49

BAB 4 PENUTUP 54

4.1. Kesimpulan 54

4.2 Rekomendasi 58

DAFTAR PUSTAKA **59**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Problematika Isu Ligkungan di Raja Ampat 27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Citra Satelit Pulau Gag tahun 2025 21

Gambar 2. Citra Satelit Pulau Kawei tahun 2025 23

Gambar 3. Citra Satelit Pulau Manuran tahun 2025 26

Gambar 4. SAVE RAJA AMPAT FROM NICKEL MINING 47

Gambar 5. NICKEL MINES DESTROY LIVES 48

Gambar 6. WHATS THE TRUE COAST OF YOUR NICKEL 48

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Greenpeace Indonesia dalam isu lingkungan di Raja Ampat tahun 2022-2025, dengan menggunakan kerangka pemilikirin Non-Govermental Organization and Development yang dikemukakan oleh David Lewis dan Nazneen Kanji. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagimana peran Greenpeace Indonesia dalam isu lingkungan di Raja ampat akibat tambang nikel di Pulau Gag, Pulau Manuran, dan Pulau Kawei. Latar belakang dari penelitian ini di dasari oleh Raja Ampat yang dijuluki "Surga Terakhir di Bumi" mengalami kerusakan akibat dari tambang nikel serta mengidentifikasi peran Greenpeace Indonesia dalam menjalanan peran nya sebagai organisasi Nonpemerintah yang berfokus pada lingkungan. Dalam teori yang dikemukakan oleh David Lewis dan Nazneen Kanji memberikan kerangka konseptual yang komperhensif dengan peran *service delivery/implementers, catalyst, dan partnership,* sehingga memperkuat bagaimana Greenpeace Indonesia dapat mengambil peran dalam isu lingkungan yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan mengandalkan data dari studi literatur, dokumen resmi dan publikasi-publikasi di internet maupun fisik.

Kata-kata kunci: Greenpeace Indonesia, Lingkungan, Raja Ampat, Tambang Nikel, Peran Organisasi Nonpemeritah.

ABSTRACT

This Reseacrh discusses the role of Greenpeace Indonesia in environmental issues in Raja Ampat from 2022 to 2025, using the Non-Governmental Organization and Development framework proposed by David Lewis and Nazneen Kanji. The main focus of this research is to analyze Greenpeace Indonesia's role in environmental issues in Raja Ampat due to nickel mining on Gag Island, Manuran Island, and Kawei Island. The background of this research is based on Raja Ampat, dubbed "The Last Paradise on Earth," which has suffered damage due to nickel mining, and identifies the role of Greenpeace Indonesia in carrying out its role as a non-governmental organization focused on the environment. The theory proposed by David Lewis and Nazneen Kanji provides a comprehensive conceptual framework with the roles of service delivery/implementers, catalysts, and partnerships, thereby strengthening how Greenpeace Indonesia can play a role in environmental issues in Indonesia. This study uses a descriptive qualitative approach and relies on data from literature studies, official documents, and publications on the internet and in print.

Keywords: Greenpeace Indonesia, Environment, Raja Ampat, Nickel Mine, The Role of Non-Govermental Organizations.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran Greenpeace Indonesia dalam mengatasi kerusakan lingkungan dengan studi kasus tambang nikel di Raja Ampat, Indonesia merupakan salah satu negara yang dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, khususnya terdapat di wilayah Papua Barat yaitu Raja Ampat. Kabupaten Raja Ampat memiliki 610 Pulau, termasuk kepulauan Raja Ampat. Dari seluruh pulau hanya 35 pulau yang berpenghuni sedangkan pulau-pulau lainnya tidak berpenghuni dan sebagian besar belum memiliki nama, hal ini membuat Raja Ampat begitu terkenal sebagai surganya biodiversitas laut dunia, memiliki sekitar 75% jenis terumbu karang yang ada di dunia serta hampir ribuan spesies laut lainnya yang beragam dan unik serta berharga secara ekologis dan juga ekonomi (Rachman 2025).

Raja Ampat yang berada di jantung segitiga terumbu karang dunia, dan merupakan salah satu lokasi yang mempunyai keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Raja ampat menjadi rumah bagi lebih dari 1.600 spesies ikan, 17 spesies mamalia laut, dan 6 dari 7 penyu yang terancam punah. Semua itu membuat Raja Ampat mendapatkan status sebagai Global Geopark dari UNESCO pada Mei 2023, setelah sebelumnya ditetapkan sebagai geopark nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2017 (Saputra 2025). Namun keberadaan tambang nikel di Kawasan Raja

Ampat menjadi ancaman yang sangat serius terhadap kelestarian lingkungan di daerah tersebut, karena aktivitas pertambangan sangat merusak ekosistem hutan dan laut secara signifikan. Eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat terjadi di 6 pulau yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), di antara lain Pulau Gag, Pulau Kawei, Pulau Manuran, Pulau Waiego, Pulau Manyaifun dan Pulau Batang Pele. Di antara ke 6 pulau tersebut aktivitas pertambangan yang aktif sudah terjadi di Pulau Gag, Pulau Kawei dan Pulau Manuran. Aktivitas pertambangan seperti deforestasi besar-besaran sudah terjadi di ketiga pulau tersebut, sedangkan di Pulau Waiego, Pulau Manyaifun, dan Pulau Batang Pele belum terlihat pembukaan lahan untuk tambang walau sudah mulai muncul aktivitas pengeboran di beberapa titik (Saputra 2025). Data citra satelit yang dianalisis oleh WALHI Papua Barat pada tahun 2023 menunjukan penurunan bertahap indeks vegetasi yang berbeda di sekitar area konsensi pertambangan, yang nmengindikasi berkurangnya keadatan vegaetasi hijau. Di beberapa area, hutan mangrove dan hutan pantai telah berubah menjadi lahan terbuka, meningkatkan risiko erosi pantai dan sedimentasi laut. Degradasi ini juga mengganggu stabilitas ekologi zona pantai, yang berungsi sebagai penyangga antar ekosistem laut (Ginting and Ginting 2025).

Pada tahun 2017 sampai Covid-19 mereda pada tahun 2021 tambang nikel di Raja Ampat beroprasi tanpa hambatan, malah kehadiran tambang nikel di Raja Ampat membawa dampak ekonomi di masa pandemi tersebut (Takdir 2022). Namun dibalik itu semua dampak lingkugan yang dirasakan oleh masyarakat di Raja Ampat sudah sangat terasa. Hal ini pertama kali diungkap dalam investigasi kompas di tanah Papua

yang berlangsung di 20 kabupaten dan kota. Pada investigasi tersebut kondisi lingkungan di Raja Ampat benar-benar rusak, dimulai dari perairan keruh, limbah menutupi terumbu karang. Setelah membaca keluhan masyarakat yang ada di Raja Ampat melalui laporan dari Kompas (KompasTV Jambi 2025). Namun sayangnya laporan dari investigasi yang dilakukan oleh Kompas buntu tidak menemukan jalan, dan nasib dari masyarakat yang sebagian besar tidak setuju, di bujuk oleh pihak tambang dengan iming-iming uang agar pulau mereka dapat di jadikan tempat pertambangan. Hal ini membuat masyarakat setempat resah dengan kegiatan tersebut, sejak kegiatan tambang masuk Raja Ampat bukan saja wilayah darat yang mengalami kerusakan untuk waktu yang panjang. Lebih dari itu, wilayah laut juga pasti akan terkena dampak negatif nya (Ambari 2022) Namun suara masyarakat tidak di dengar oleh siapa pun.

Pada penelitian kali ini saya akan mengangkat subjek penelitian yang merupakan Organisasi Nonpemerintah yaitu Greenpeace Indonesia, Greenpeace Indonesia merupakan bagian dari aktror transnasional yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap isu lingkungan di Raja Ampat. Kontribusi ini tentunya mempercepat kenaikan isu lingkungan dan memperluas jangkauan publik baik ditingkat nasioal maupun internasional dengan latar belakang tersbut Greenpeace Indonesia muncul sebagai aktor peguat di dalam isu lingkungan di Raja Ampat. Melalui ekspedisi lapangan yang mempertemukan mereka dengan aktor utama yaitu organisasi masyarakat akar rumput seperti petani, nelayan dan warga lokal yang merasakan kerusakan lingkungan di kepulauan tempat mereka tinggal.

Pada tahun 2022 akhirnya Greenpeace Indonesia merespon dengan investigasi oleh Greenpeace Indonesia bersama LBH Papua Sorong dan WALHI Papua Barat. Pada saat investigasi lapangan tersebut Greenpeace Indonesia berdiskusi dengan masyarakat setempat dan menemukan hasil bahwa masyarakat lokal yang ada di Raja Ampat menolak kehadiran tambang nikel namun tidak di respon oleh pemerintah setempat. Tahun 2022 adalah sebagi titik awal Greenpeace Indonesia berfokus serta mendeteksi ancaman nikel yang ada di Raja Ampat, deforestasi besar-besaran yang diungkap Greenpeace Indonesia benar-benar merusak tutupan lahan dan hutan yang ada di Raja Ampat, ditunjang dengan teknologi canggih yang dimiliki, Greenpeace Indonesia mengoptimalkan investigasi dan menemukan berbagai fakta yang dapat Greenpeace Indonesia untuk bisa membantu masyarakat di Raja Ampat yang merasakan dampaknya secara langsung (KompasTV Jambi 2025).

Greenpeace Indonesia di dalam berbagai kampanye telah menyerukan agar pemerintah lebih mengedepankan pembangunan berkelanjutan, yang selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat adat sekaligus tetap menjaga lingkungan hidup (Lumbanrau 2025). Greenpeace Indonesia sebagai salah satu organisasi non pemerintah yang berfokus mengenai isu-isu lingkungan berperan aktif mengawal isu tersebut dengan melakukan berbagai upaya untuk mencegah dalam mengatasi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat. Menurut Greenpeace, pemerintah telah mencabut izin usaha pertambangan di beberapa pulau yang ada di Raja Ampat sebagai buah dari tekanan dan pengawalan organisasi ini beserta Masyarakat dan kelompok aktivis. Namun, Greenpeace Indonesia tetap

mengawasi agar pencabutan izin tersebut benar-benar diimplementasikan dan berkelanjutan demi perlindungan yang permanen di Kawasan Raja Ampat (Greenpeace Indonesia 2025a).

Data yang didapatkan Greenpeace Indonesia menunjukan bahwa aktivitas penambangan nikel ini telah mengakibatkan berbagai kerusakan lingkungan yang cukup ekstensif, termasuk hilangnya lebih dari 500 hektare hutan di Pulau Gag, Kawei dan Manuran yang ada di Raja Ampat. Selain itu dampak lainnya adalah sedimentasi yang menaikan risiko kerusakan terumbu karang yang menjadi habitat dari berbagai biota laut yang ada. Kondisi ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melarang aktivitas tambang di Kawasan atau area yang sensitif (Octavia and Setuningsih 2025).

Aktivitas tambang telah menyebabkan berbagai masalah salah satunya adalah pembukaan lahan yang luas di kawasan konservasi Raja Ampat, isu ini dinilai sangat krusial terutama dalam mengevaluasi izin-izin tambang yang dinilai merusak lingkungan serta mengancam keberlangsungan hdup masyarakat adat (Salmah 2025). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah melakukan tindakan tegas dengan menyegel beberapa Perusahaan tambang yang terbukti melanggar izin lingkungan. Namun, di dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas tersebut memang masih menjadi tantangan yang sangat besar, mengingat adanya Perusahaan yang terus beroperasi dan potensi perizinan yang masih di berikan (Rumandi 2025).

Dalam perspektif hubungan internasional dan pembangunan berkelanjutan, peran Greenpeace Indonesia sebagai salah satu dari Organisasi Nonpemerintah tentunya sangat penting untuk mengisi celah dari kelembagaan dan juga memperkuat pengawasan serta advokasi terhadap praktik praktik industri maupun tambang yang berpotensi atau sudah merusak lingkungan. Sebagai Organisasi Non Pemerintah (NGO) yang berfokus dan aktif pada isu-isu lingkungan di berbagai negara termasuk Indonesia. Greenpeace Indonesia mengadopsi berbagai peran yang sangat strategis, Greenpeace Indonesia melakukan berbagai macam kampanye, mengedukasi, dan mengadvokasi di dalam perjalanannya. Advokasi dan aktivitas yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia juga menunjukan pentingnya jaringan transnasional di dalam memperkuat pergerakan serta suara masyarakat lokal yang bertujuan untuk menarik perhatian global terhadap isu-isu lingkungan secara kritis. Di dalam keberlangsungannya Greenpeace Indonesia memanfaatkan kemampuan mobilisasi dukungan internasional untuk memberikan tekanan kepada pemerintah dan juga perusahaan agar menjalankan aktivitas usaha yang tidak merusak lingkungan serta selalu menjunjung hak-hak yang ada pada seluruh masyarakat.

Greenpeace Indonesia selalu mendesak pemerintah untuk tidak hanya mencabut izin pertambangan tetapi juga mengatasi dampak yang akan muncul dari berbagai aspek, termasuk berbagai perlindungan terhadap hak-hak dari masyarakat adat maupun masyarakat di sekitar termasuk nelayan yang sangat terdampak langsung akibat dari aktivitas pertambangan yang ada (Nurhidayat 2025). Dengan adanya kehadiran dari Greenpeace Indonesia di Raja Ampat terutama di Pulau Gag, Kawei dan

Manuran, merupakan sebuah bukti nyata atas refleksi penting dari peran Organisasi Nonpemerintah NGO dalam mengisi ruang demokrasi lingkungan yang memberi kesempatan bagi masyarakat sipil untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu kasus isu lingkungan ini sangat vital, mengingat kerusakan lingkungan yang terjadi bukan hanya bersifat nasional tetapi juga memiliki implikasi global, terutama di dalam upaya untuk memitigasi perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Penelitian ini akan membahas bagaimana peran Greenpeace Indonesia dalam isu lingkungan di Raja Ampat yang berfokus ketiga pulau yaitu Pulau Gag, Pulau Kawei dan Pulau manuran, yang sangat relevan untuk dikaji lebih dalam karena menyoroti bagaimana Organisasi Nonpemerintah (NGO) yang berfokus pada isu-isu lingkungan dapat menjadi aktor kunci dalam isu lingkungan yang bersifat berkelanjutan dan juga perlindungan sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sendiri. Hal ini juga akan bermanfaat untuk memahami model advokasi sosial serta kerjasama lintas pemangku kepentingan yang begitu berperan efektif dalam upaya mitigasi kerusakan lingkungan akibat kegiatan ekonomi ekstraktif (Rachman 2025).

Dengan penjabaran yang ada di atas, penelitian ini akan mengambil fokus pada peran Greenpeace Indonesia dalam isu lingkungan di Raja Ampat yang berfokus ketiga pulau yaitu Pulau Gag, Pulau Kawei dan Pulau manuran dan akibat dari tambang nikel yang dilakukan, selain itu penelitian ini juga merupakan salah satu bagian dari kajian yang penting di dalam ranah Hubungan Internasional. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana Greenpeace Indonesia berperan sebagai penyedia layanan, agen perubahan

dan menjalin kerjasama yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia dalam perlindungan lingkungan sehingga dapat memberikan pemahaman bagaimana peran NGO bergerak sesuai dengan peran yang mereka jalankan. Dengan didasari oleh pemahaman dan juga dinamika yang ada di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi gambaran dan strategi bagi organisasi lingkungan yang lain di dalam menjaga kerusakan lingkungan agar dapat berupaya dalam isu lingkungan yang ada di Raja Ampat.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran Greenpeace Indonesia Indonesia dalam isu lingkungan di Raja Ampat tahun 2022 - 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi kerusakan lingkungan yang terjadi di Raja Ampat sebagai dampak langsung dan tidak langsung dari aktivitas pertambangan nikel.
2. Menganalisis peran Greenpeace Indonesia sebagai Organisasi Nonpemerintah dalam melakukan advokasi, kampanye, dan pengawasan terhadap pertambangan nikel yang merusak Raja Ampat.

1.4 Cakupan penelitian

Cakupan penelitian ini akan meliputi analisis peran Greenpeace Indonesia dalam isu lingkungan yang akan merujuk ke dalam studi kasus tambang nikel yang ada di Raja Ampat, penelitian ini akan berfokus pada kajian dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan nikel di kawasan Pulau Gag, Pulau Kawei dan Pulau manuran, khususnya terkait dengan kerusakan ekosistem laut, hutan serta dampak terhadap masyarakat yang ada di Raja Ampat. Selain itu penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana peran Greenpeace Indonesia sebagai Organisasi Nonpemerintah melakukan penyedia layanan, agen perubahan dan menjalin kerjasama dalam mengatasi kerusakan lingkungan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka pertama berasal dari literatur yang berjudul *"Upaya The Nature Conservancy Dalam Konservasi Terumbu Karang Dan Lingkungan Pesisir Di Kawasan Perairan Nusa Penida, Bali"* yang ditulis oleh Savitri dkk. Penelitian ini membahas bagaimana peran TNC sebagai NGO dalam konservasi terumbu karang dan lingkungan pesisir Kawasan Nusa Penida, Bali. TNC menjalankan berbagai upaya seperti edukasi publik, peningkatan kapasitas masyarakat, penelitian sumber daya laut, dan advokasi kebijakan konservasi melalui program oral Triangle Center yang telah berlangsung sejak tahun 2010. Pada penelitian ini mengacu kepada konsep *Non Governmental Organization* (NGO) yang mengklasifikasikan NGO sebagai organisasi advokasi, pelaksanaan layanan, atau *hybrid*, sekaligus teori Sustainable Development yang menekankan keadilan antar generasi dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Dengan tinjaun Pustaka ini memberikan berbagai Gambaran yang konkret bagaimana NGO dapat mengintegrasikan advokasi, pendidikan, dan juga kemitraan dalam melindungi secara berkelanjutan (Savitri, I Made Anom Wiranata, S.IP, and Resen 2015).

Tinjauan Pustaka yang kedua berasal dari literatur yang berjudul "*Pola Kemitraan NON-GOVERNMENT ORGANIZATION (NGO) YAYASAN SAYAP IBU DENGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MENGATASI ANAK HOMELESS"* yang ditulis oleh RA Siti Saskia dan DRA Pudji Astuti. Pada tinjauan Pustaka ini membahas mengenai seberapa penting nya Organisasi Nonpemerintah, terkhusus Yayasan Sayap Ibu, dalam menangani anak terlantar (*homeless)* di Provinsi DKI Jakarta melalui kemitraan dengan pemerintah. Yayasan Sayap Ibu mulai bermitra dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 1976, dan kemitraan ini bertujuan mengoptimalkan penanganan anak *homeless* yang tidak dapat diatasi sendiri oleh NGO tersebut. Pada penelitian ini menggunakan teori partisipas yang menyatakan bahwa partisipasi Masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan sosial yang merupakan sebuah wujud pengembangan demokrasi dengan pendekatan *bottom top* yang dikemukakan oleh H.A.R Tilaar pada tahun 2009. Kemitraan dilihat melalui teori kemitraan yang dapat mendefinisikan kemitraan sebagai kerjasama formal antar organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam konteks ini, pola kemitraan *mutualism partnership* menjadi dasar kemitraan Yayasan Sayap Ibu dengan pemerintah setempat, yang menekankan hubungan saling menguntungkan, kepercayaan, dan komitmen Bersama dalam menangani anak terlantar. Selain itu, dengan teori ini juga menekankan

kerjasama antarlembaga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu pada penelitian ini juga terdapat teori Pembangunan Komunitas yang dikemukakan Tjokrowinoto pada tahun 1987 juga digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal dalam meningkatkan kualitas hidup. Faktor pendukung kemitraan meliputi beberapa hal antara lain *networking*, *cooperation*, *coordination*, *willingness*, *trust*, *dan capability*, sedangkan kendala utama adalah ketidak pastian anggaran dan komunikasi yang kurang optimal (FERNANDYA and ASTUTI, n.d.).

Tinjauan Pustaka ketiga berasal dari literatur yang berjudul "*Peran ECCO Foundation Dalam Mencapai Suistanable Development Goals Pilar 11 Dan 13 Di Desa Genggelang Melalui Program 5P Youth Campus"* yang ditulis oleh Nadisa Shafira. Literatur ini membahas mengenai peran NGO yang terkhusus ECCO Foundation, dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Genggelang, Lombok Utara, melalui program 5P *Youth Campus*. SDGs merupakan agenda global yang bertujuan mewujudkan Pembangunan berkelanjutan dengan prinsip "*No One Left Behind*." ECCO Foundation fokus pada dua pilar SDGs yaitu pilar 11 (*Sustainable Cities and Communities*), pilar 13 (*Climate Action*) terkait penanganan perubahan iklim dengan memperkuat ketahanan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Elisabeth dan Damien mengenai NGO yang memiliki tiga peran antara lain yaitu mengkomunikasikan SDGs, meminta pertanggung jawaban *private sector*, dan juga melaksanakan proyek, pada teori yang kedua adalah teori yang dikemukakan oleh

United Nation pada tahun 1966 yang mengemukakan sebuah konsep mengenai *Sustainable Development Goals* yang mempunyai berbagai pilar diantaranya untuk mengakhiri kemiskinan dan mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim (Ariyanto 2025).

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam buku "*Non-Governmental Organizations and Development*" pada tahun 2009, David Lewis dan Nazneen Kanji mengungkapkan bahwa NGO adalah organisasi swadaya masyarakat, swasta, dan nirlaba yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang beruntung (Lewis and Kanji 2009). Selain itu di dalam buku tersebut juga mengungkapkan NGO merupakan organisasi *independen* yang tidak dijalankan oleh pemerintah atau didorong oleh motif keuntungan seperti sektor swasta. Dalam menjalankan tugasnya NGO memiliki tiga peran dasar, yaitu: *service delivery, catalyst, dan partnership* (Lewis and Kanji 2009).

Dalam peran *Service Delivery/Implementers*, merupakan peran pertama NGO yang dikemukakan oleh (Lewis and Kanji 2009). Dalam memberikan bantuan secara langsung dengan cara memobilisasi berbagai sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa bagi orang yang membutuhkan. Dalam hal ini, NGO biasanya terjun kelapangan dan memberikan bantuan secara langsung dan memberikan keperluan baik barang-barang yang diperlukan seperti obat-obatan, makanan, pakaian ataupun bantuan jasa seperti tenaga pengajar yang akan mengedukasi masyarakat terkait suatu topik atau isu. Dalam menjalankan programnya, NGO bisa bertindak berdasarkan inisiatif sendiri maupun atas dasar kesepakatan kerjasama dengan pemerintah atau pihak donor.

Peran *Catalyst*, merupakan peran kedua NGO yang dikemukakan (Lewis and Kanji 2009). Pada peran ini NGO sebagai agen untuk merubah pandangan masyarakat terkait suatu hal atau isu. Dalam hal ini NGO disebut berperan sebagai katalisator yang berusaha melakukan berbagai kegiatan advokasi dengan tujuan merubah pandangan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan atau merubah kebijakan terkait suatu permasalahan.

Peran *Partnership*, merupakan peran ketiga NGO yang dikemukakan oleh (Lewis and Kanji 2009). Pada peran ini NGO berperan untuk melakukan kerjasama dengan aktor lain seperti pemerintah, perusahaan, donatur, ataupun sesama NGO. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama seperti efisiensi sumber daya.

Dalam konteks ini, Greenpeace Indonesia lebih menonjol menjalankan tiga peran utama, yakni sebagai agen perubahan yang aktif melakukan kampanye, advokasi, dan turun langsung melakukan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sampai melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menunjang isu-isu lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran laut, dan krisis iklim. Melalui berbagai aksi kampanye kreatif dan tekanan terhadap pembuat kebijakan, Greenpeace Indonesia berusaha mendorong perubahan sikap publik serta mendorong pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang lebih berpihak pada kelestarian lingkungan. Selain itu, Greenpeace Indonesia juga menjalankan peran *partnership* dengan menjalin kolaborasi dengan komunitas lokal, media, serta lembaga internasional guna memperkuat dampak advokasinya. Meskipun tidak berfokus pada *service delivery* dalam bentuk bantuan

langsung, keberadaan Greenpeace Indonesia tetap memberikan kontribusi signifikan dalam upaya penyelamatan lingkungan melalui pemberdayaan informasi dan pengaruh sosial.

Dengan adanya peran Greenpeace Indonesia ini dapat memperkuat bagaimana NGO mengambil peran untuk meningkatkan pengetahuan mengenai isu lingkungan di Raja Ampat. Dengan pendekatan yang multifungsi, Greenpeace Indonesia mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat sehingga menggerakan pola perubahan yang ada di masyarakat. Dengan demikian, teori NGO and *Development* ini ini dapat memberikan kerangka konseptual yang komprehensif yang bertujuan untuk memahami bagaimana Greenpeace Indonesia dapat menjalankan perannya dengan efektif terkait isu lingkungan di Raja Ampat, dengan demikian penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi NGO dalam isu lingkungan di Raja Ampat.

1.7 Argumen Sementara

Penelitian ini menyoroti analisis peran Greenpeace Indonesia sebagai NGO di dalam is lingkungan dengan studi kasus tambang nikel di Raja Ampat. Berdasarkan teori David Lewis dan Nazneen Kanji, Greenpeace Indonesia mempunyai peran utama sebagai implementor, *catalyst* dan partner. Sebagai implementor, Greenpeace Indonesia memberikan berbagai bantuan mulai dukungan finansial sampai edukasi tentang penyebab dari aktivitas tambang nikel yang ada di Raja Ampat. Sebagai *catalyst*, Greenpeace Indonesia menginspirasi perubahan sosial melalui advokasi dan kampanye kesadaran, memberdayakan komunitas lokal. Sebagai partner, Greenpeace Indonesia bekerjasama dengan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk

pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Peran multifungsi Greenpeace Indonesia ini mendorong tindakan kolektif dalam mengatasi kerusakan lingkungan yang akan terjadi.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini dipilih karena metode ini berbasis pendekatan konstruktivisme sosial yang membentuk pemahaman melalui interaksi sosial dan pengalaman secara individu. Metode kualitatif juga bersifat deskriptif dengan memberikan definisi pada suatu peristiwa yang dibentuk melalui pengalaman kelompok maupun individu sehingga sangat relevan dengan pengumpulan data yang digunakan.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang dianalisis pada penelitian ini adalah Greenpeace Indonesia yang merupakan organisasi lingkungan hidup internasional yang aktif dalam melakukan berbagai pergerakan mengenai isu-isu lingkungan, kemudian objek yang dianalisis pada penelitian ini adalah bentuk-bentuk kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh Greenpeace, penulis akan menganalisis bagaimana cara Greenpeace Indonesia dalam isu lingkungan yang ada di Raja Ampat terutama di Pulau Gag, Kawei, dan Manuran akibat dari aktivitas tambang nikel.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan melalui data sekunder. Yang dimana, penulis menggunakan data-data yang bersumber dari publikasi-publikasi di internet maupun fisik yang terbukti secara resmi, akurat dan juga terpercaya. Sehingga data-data tersebut dapat digunakan sebagai sumber analisis untuk jawaban dari rumusan masalah di penelitian ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Penelitian ini akan melewati tiga tahap penelitian. Pertama, penulis memilah dan menyederhanakan data yang akan digunakan dari catatan, dokumen transkrip, dan sumber empiris lainnya. Kemudian, data yang sudah dipilah itu ditampilkan dengan tujuan agar kesimpulan bisa didapat. Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dari data yang diperoleh yakni menginterpretasikan data-data yang diperoleh baik itu berupa preposisi, sebab, akibat, dan pola-pola (B. MILES and HUBERMAN 2014).

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab 1: Pada bab ini, penelitian akan diawali dengan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, dan metode penelitian.

Bab 2 : Isu lingkungan di Raja Ampat pada tahun 2022-2025

Bab 3 : Peran Greenpeace Indonesia Indonesia dalam isu lingkungan di Raja Ampat pada tahun 2022-2025.

Bab 4 : Kesimpulan, dan dilanjutkan oleh saran atau rekomendasi sebagai penutup dari penelitian ini.

BAB 2

ISU LINGKUNGAN DI RAJA AMPAT

2.1. Problematika Isu Lingkungan di Raja Ampat

Raja Ampat sebuah kepulauan di Papua Barat Daya yang dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Kawasan ini dikenal juga sebagai “Surga terakhir di bumi" karena keindahan alam, berlimpahnya ekosistem laut serta daerah hutan tropisnya. Hal ini dapat dilihat sejak beberapa tahun belakangan Raja Ampat menghadapi problematika lingkungan yang sangat serius akibat dari aktivitas pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat tersebut.

Kabupaten Raja Ampat memiliki 610 Pulau, termasuk kepulauan Raja Ampat. Dari seluruh pulau hanya 35 pulau yang berpenghuni sedangkan pulau-pulau lainnya tidak berpenghuni dan sebagian besar belum memiliki nama. Eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat terdiri dari 6 pulau yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), di antara lain Pulau Gag, Pulau Kawei, Pulau Manuran, Pulau Waiego, Pulau Manyaifun dan Pulau Batang Pele. Di antara ke 6 pulau tersebut aktivitas pertambangan yang aktif sudah terjadi di Pulau Gag, Pulau Kawei dan Pulau Manuran. Aktivitas pertambangan

seperti deforestasi besar-besaran sudah terjadi di ketiga pulau tersebut, sedangkan di Pulau Waiego, Pulau Manyaifun, dan Pulau Batang Pele belum terlihat pembukaan lahan untuk tambang walau sudah mulai muncul aktivitas pengeboran di beberapa titik (Saputra 2025). Menurut (Maulana 2025), analisis satelit menunjukan perubahan tutupan lahan yang sangat signifikan di 3 Pulau yang ada di Raja Ampat pada rentang tahun 2022 sampai 2025 yang menandakan bahwa pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat sangat benar-benar mempengaruhi lingkungan yang luar biasa (Riyanto and Nistanto 2025).

Pulau gag merupakan pulau yang terletak di Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Sorong, Papua. Merupakan lokasi tambang nikel yang dieksploitasi sejak lama, pulau ini memiliki luas sekitar 6.500 hektar, saat ini pulau tersebut hampir keseluruhan pulau sudah di jamah perusahaan tambang nikel yaitu PT. Gag Nikel yang sudah mengantongi izin aktivitas tambang yang diperbolehkan untuk menambang dengan pola terbuka di kawasan hutan lindung (Kementerian Lingkungan Hidup 2025). Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang aktif dalam memproduksi nikel di Raja Ampat, saat ini bukaan tambang yang sudah dilakukan oleh PT. Gag Nikel sampai di akhir tahun 2024 sudah mencapai 187,87 hektar dengan sebagian wilayah yang sudah dilakukan reklamasi dan area ini juga mencakup kawasan geopark penting di Pulau Gag, kawasan geopark yang memiliki tutupan hutan yang sangat penting dalam menjaga lingkungan bagi flora dan fauna yang terdapat di Raja Ampat (Alif Al Hikam 2025).

Eksploitasi yang ada di Pulau Gag, berdasarkan data dari pemantauan satelit dan laporan warga menurut (Asnawi and Salman 2025) terdapat deforestasi signifikan di hutan lindung dan sedimentasi berat yang mencemari perairan. Jika dilihat dampak ini mengancam keberlanjutan terumbu karang, kerusakan hutan bakau, mangrove dan mempengaruhi stabilitas ekosistem yang ada di daerah pesisir. Sedimentasi aktivitas tambang bukan hanya berpengaruh kepada daratan yang ada di Pulau Gag, sedimentasi dapat mengurangi tingkat kejernihan air kemudian dapat mengendap juga di terumbu karang dan terumbu karang pun bisa mati secara perlahan karena endapan tadi (Pohan et al. 2025). Kandungan logam berat dan bahan kimia berbahaya bercampur dengan air laut, mengancam biota laut yang ada di dalamnya dan juga kesehatan masyarakat lokal yang mengandalkan sumber daya laut (Asnawi and Salman 2025). Akibat dari tambang di Pulau Gag ini tentunya membuka kawasan hutan tropis primer yang sangat berpotensi mengalami kerusakan mulai dari peingkatan erosi dan sedimentasi laut, hilangnya habtat flora dan fauna endemic, sampai potensi pencemaran air dan tanah oleh logam berat sepeti nikel dan kronium akibar aktivitas pengolahan bijih dan pembuangan (Pangestu and Yusuf 2025).

Datang dari kerusakan ekosistem lingkungan berujung pada kerusakan berbagai aspek sosial di masyarakat Raja Ampat, masyarakat adat di Pulau Gag merupakan suku asli Papua yang mendiami pulau tersebut secara turun-temurun sejak tahun 1940. Dikutip dari tribun sorong tercatat saat ini masyarakat di Pulau Gag terdiri dari 357 Kepala Keluarga (KK) dengan lebih dari 1.000 jiwa yang menempati kampung di Pulau Gag secara turun-menurun (Safwan 2025). Namun, keberadaan mereka sebagai

masyarakat adat belum diakui secara resmi maupun dipetakan dalam sistem Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Raja Ampat, berbagai upaya sudah dilakukan di Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya menyuarakan pentingnya pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah yang dikenal sebagai “Surga Kecil di Bumi” ini (Safwan 2025).

Faktor ini jelas menimbulkan ketegangan sosial yang terjadi dan menjadi celah besar yang menguntungkan koorporasi seperti PT. Gag Nikel, masyarakat di Pulau Gag menuntut pemetaan wilayah dan pengakuan MHA agar hak-hak mereka serta identitas mereka dihormati. Selain itu, masyarakat asli Pulau Gag juga menuntut dan menolak tambang nikel beroperasi dikarenakan dampak lingkungan dan sosial makin terasa, melalui investigasi dari (Maulana and Adiningsih 2025) mengungkap bahwa masyarakat adat di sekitar Pulau Gag tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait tambang. Mengingat dampak negatif yang dilahirkan aktivitas pertambangan yang berpengaruh pada ketersediaan air, kurangnya hasil pendapatan laut dan mengancam keanekaragaman hayati yang ada di Pulau Gag.

Gambar 1 Citra Satelit Pulau Gag tahun 2025



Sumber : Europe Union (2025)

Pulau Kawei, salah satu pulau yang ada di Raja Ampat mengalami nasib yang sama, PT. Kawei Sejahtera Mining (PT KSM) memegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan keputusan Menteri LHK tahun 2022. Eksploitasi besar-besaran tambang nikel yang secara resmi dilakukan pada tahun 2023 dikelola langsung oleh PT. Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), merupakan sebuah perusahaan yang mendapatkan izin pertambanan dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Syahrani 2025). Aktivitas pertambangan di Pulau Kawei menimbulkan berbagai macam kontroversi karena pulau termasuk dalam wilayah yang seharusnya dilindungi sebagai kawasan hutan lindung dan area konservasi laut.

Dampak yang luar biasa juga dirasakan di Pulau Kawei, terutama pada kerusakan fungsi hutan lindung yang ada di Pulau Kawei. Pembukaan lahan besar-

besaran untuk tambang nikel (CA 2025), menyebabkan deforestasi yang mengancam flora dan fauna endemik di kawasan ini. Disisi lain, Menurut (Laia 2025) adanya aktivitas tambang di Pulau Kawei menyebabkan penurunan kualitas air permukaan dan air tanah yang mengalami penurunan akibat pencemaran dari limbah yang dihasilkan oleh tambang nikel. Hal ini juga sangat berdampak bagi aktivitas masyarakat dari Pulau Kawei, terdapat banyak laporan dari masyarakat lokal yang mengeluhkan penurunan hasil tangkapan ikan dan perubahan kualitas air di sekitar Pulau Kawei setelah tambang dimulai.

Hal yang sama juga dirasakan oleh masyarakat adat di Pulau Kawei, yang mayoritas berasal dari suku Betew dan Maya, mereka langsung menghadapi dampak sosial yang sangat serius yang diakibatkan oleh tambang nikel di wilayah mereka. Dikutip dari website Dewan Perwakilan Daerah Dr. Filep Wamafma, SH, MHum menyatakan bahwa masyarakat adat suku Betew dan Maya dari 12 kampung di Raja Ampat secara tegas menolak kehadiran tambang nikel termasuk di pulau Kawei (Ruhmana 2025). Mereka menilai tambang nikel merusak warisan budaya dan mengancam mata pencaharian tradisional yang bergantung pada laut dan pertanian, selain itu kehidupan masyarakat adat di Pulau Kawei mengandalkan ekosistem laut yang sehat sebagai sumber mata pencaharian tradisional, khususnya para nelayan.

Aktivitas pertambangan nikel yang melakukan pembukaan lahan secara besar-besaran membuat ancaman secara langsung terhadap keberlanjutan dari ekosistem laut dan daratan mereka yang membuat mata pencaharian masyarakat adat terganggu. Konflik ini dimulai dari penguasaan tanah ulayat yang menurut masyarakat adat

setempat diambil alih secara sepihak oleh PT. Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), masyarakat menilai bahwa aktivitas pertambangan ini merupakan bentuk perampasan atas tanah adat dan merusak warisan budaya yang sudah ada sejak nenek moyang mereka.

Gambar 2 Citra Satelit Pulau Kawei tahun 2025



Sumber : Google – Citra (2025)

Pulau Manuran, memiliki nasib sama dengan dua pulau yang ada di Raja Ampat. Meskipun pulau ini terbilang memiliki luas wilayah yang tergolong kecil sekitar 743 hektar, kalah jauh dibanding dengan kedua pulau lain, tetapi Pulau Manuran juga harus memiliki nasib yang sama dengan Pulau Gag dan Pulau Kawei. Eksploitasi nikel di Pulau Manuran mengantongi izin yang terbilang cukup lama dari tahun 2006 tetapi banyak sekali menimbulkan penolakan dari masyarakat lokal yang ada,

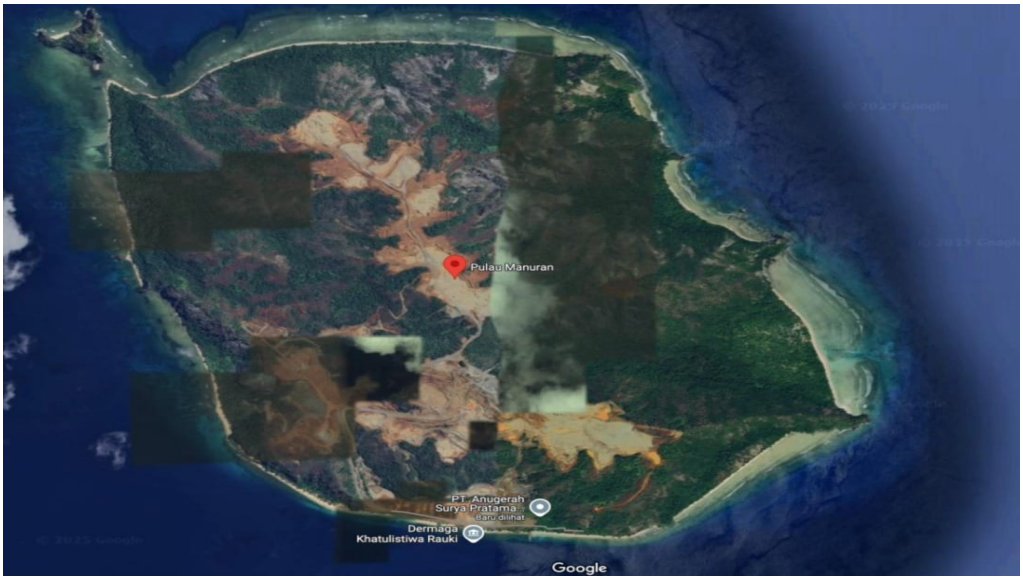
dikarenakan dampaknya sangat besar untuk ekosistem kecil yang ada di pulau tersebut. Selain itu, eksploitasi yang dilakukan di Pulau Manuran mencapai sekitar 1.173 hektar oleh PT. Anugerah Surya Pratama (Dwi Saputra 2025), izin konsesi tambang yang diberikan kepada PT Anugerah Surya Pratama melebihi luas dari Pulau Manuran. Dengan adanya izin tersebut, Pulau Manuran yang sangat Kecil tetapi memiliki cakupan dan tekanan yang tidak sesuai dengan kapasitas nya dan hal ini menjadi problematika nyata yang dihadapi lingkungan di daerah Raja Ampat.

Pulau Manuran, merupakan Pulau yang sangat terdampak dari pertambangan nikel mulai dari penurunan kualitas air karena kandungan-kandungan dari limbah kimia, sedimentasi yang sangat merusak terumbu karang, dan degradasi habitat flora dan fauna yang sangat signifikan. Selain itu pada tahun 2025 terjadi jebolnya kolam pengendapan limbah atau yang dinamakan settling pond di Pulau Manuran, dikutip dari (Prihatin and Wiji Utomo 2025) insiden kebocoran kolam limbah PT Anugerah Sejahtera menunjukan kelemahan dalam sistem pengelolaan limbah oleh perusahaan. Kebocoran ini tepatnya ditemukan saat inspeksi oleh tim Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) pada awal Juni 2025. Kolam limbah milik PT Anugerah Surya Pratama, bocor dan menyebabkan kenaikan pencemaran kualitas air di sekitar pulau, menjadikan perairan keruh dan sangat berdampak negatif pada ekosistem laut disekitar Pulau Manuran.

Aktivitas tambang nikel membawa perubahan besar pada lingkungan alam sekitar serta kehidupan masyarakat adat yang sangat bergantung pada ekosistem laut dan pesisir sebagai sumber kehidupan mereka. Kondisi ini sudah di rasakan sejak tahun

2022, ancaman nyata yang sedang di hadapi sekarang adalah upaya introduksi untuk pengembangan pulau menjadi lokasi pertambangan nikel. Upaya tersebut saat ini sudah masuk dengan cara membujuk masyarakat adat untuk bisa menerima. Dengan iming-iming uang, upaya introduksi tersebut terus berjalan, walau mayoritas ada yang menyatakan penolakan. Mereka khawatir, jika keseluruhan pulau ada yang diubah menjadi area tambang, maka dampak negatif nya bisa dalam waktu yang panjang. Dilansir dari website BBC yang mewawancarai langsung pemudi asal Raja Ampat Paulina 2025 bercerita, Pulau Manuran yang terletak dengan kampungnya Kabare kini sebagian telah gundul oleh tambang. Bukan hanya itu, terumbu karang dan ikan yang berada di sekitar pulau pun tercemar limbah dari tambang, selain itu di musim pasang surut limbah tambang berwarna coklat mengalir dan mencemari hingga kampung saya, padahal di masa lalu Pulau Manuran menjadi tempat bagi warga kampungnya untuk mencari ikan dan hasil hutan. Adanya aktivitas tambang menyebabkan penurunan kualitas terumbu karang dan juga populasi ikan seperti kakap, kerapu dan lobster yang merupakan sumber mata pencaharian penting bagi masyarakat adat di Pulau Manuran (Lumbanrau 2025). Selain itu masyarakat di Pulau Manuran memiliki tradisi lokal yang dinamai “sasi." Sasi adalah tradisi atau aturan tidak tertulis masyarakat adat yang melarang penangkapan hewan laut dalam waktu tertentu (Pili 2023), "sasi” yang merupakan sebuah sistem larangan adat terhadap pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga sebagian wilayah adat yang seharusnya mendapat perlindungan malah menjadi milik perusahaan tambang dengan aktivitas eksploitasi.

Gambar 3. Citra Satelit Pulau Manuran tahun 2025



Sumber : Google – Citra (2025)

Berbagai problematika terus muncul dikarenakan aktivitas tambang nikel, isu lingkungan di Raja Ampat merupakan gambaran jelas dari dilema global tentang bagaimana mengelola sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan itu sendiri. Menurut (Neo Energy 2024) Nikel memiliki peran yang sangat penting dalam industri energi hijau, terutama untuk baterai kendaraan listrik, Indonesia sebagai produsen utama dengan cadangan nikel terbesar di dunia yang memiliki posisi cukup strategis dalam rantai pasok global untuk transisi energi hijau. Namun pada kenyataannya eksploitasi ini menimbulkan risiko kerusakan yang bersifat final dan sangat sulit untuk dipulihkan, menurut (Maulana 2025) ini tentu tidak hanya mengancam dari keberadaan hutan dan laut, tetapi ada manusia yang tinggal disitu. Menjadi ancaman untuk keanekaragaman hayati, selain itu kerusakan ekosistem laut Raja Ampat tidak hanya terbatas pada wilayah lokal. Keresahan ini

dimulai dari tahun 2022 yang dimana pada tahun tersebut penolakan serta keresahan sudah di sampaikan oleh masyarakat yang ada di Pulau Gag, namun hal ini tidak di respon oleh pemerintah setempat. Pada saat itu nvestigasi kompas datang untuk mendengar keluhan masyarakat dan mengangkat isu lingkungan tersebut, setelah itu Greenpeace Indonesia memulai investigasi bersama LBH Papua Sorong dan WALHI Papua Barat (KompasTV Jambi 2025). Dampaknya dapat meluas secara signifikan terhadap populasi ikan migran, khususnya tuna dan cakalag, yang tidak hanya mempengaruhi perairan Indonesia tetapi juga jalur migrasi mereka yang membentang hingga Samudra Hindia dan Pasifik (Sani and Syamsuddin 2025). Para aktivis lingkungan serta akademisi menekankan bahwa nilai ekologis dan sosial di Raja Ampat jauh lebih besar dan bernilai jangka panjang daripada keuntungan ekonomi semata.

Tabel 1 Problematika isu lingkungan di Raja Ampat

Pulau	Problematika	Aktor	Periode
Pulau Gag	Deforestasi besar-besaran, pembukaan lahan melebihi izin, sedimentasi merusak terumbu karang, dan konflik sosial.	PT. Gag Nikel, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Masyarakat adat.	2017 - 2025

Pulau Kawei	Pembukaan lahan melampaui batas izin, kerusakan kawasan lindung, sedimentasi, penurunan kualitas air, dan konflik suku Betew-Maya.	PT. Kawei Sejahtera Mining, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Masyarakat adat suku Betew dan Maya.	2023 - 2025
Pulau Manuran	Jebolnya kolam limbah, pencemaran air laut, sedimentasi, berkurangnya populasi ikan, konflik sosial.	PT. Anugerah Surya Pratama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Masyarakat Adat.	2014 - 2025

2.2 Solusi Problematika Isu Lingkungan di Raja Ampat

Problematika isu lingkungan di Raja sangat kompleks, aktivitas eksploitasi nikel yang masif telah menyebabkan kerusakan ekologi yang memerlukan solusi tepat dalam menindaklanjuti problematika yang ada di Pulau Gag, Pulau Kawei, dan Pulau Manuran. Meskipun berbagai solusi sudah direncanakan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tetapi pada kenyataanya solusi tersebut sampai saat ini belum membuahkan hasil.

Pulau Gag di Raja Ampat telah menjadi lokasi eksploitasi tambang nikel yang hampir seluruh wilayahnya telah dikeruk kekayaan alamnya untuk perusahaan PT Gag Nikel, dengan adanya problematika ini kegiatan eksploitasi tambang di Pulau Gag memerlukan langkah yang tepat dalam menghentikan dampak yang telah diberikan. Pada tanggal 5 Juni 2025, PT Gag Nikel dihentikan sementara dalam aktivitas pertambangannya oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pemberhentian dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang datang dari masyarakat mengenai dampak pertambangan yang sangat dirasakan oleh masyarakat, serta untuk melakukan verifikasi kondisi di lapangan. Setelah pemberhentian ini terjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan beberapa sanksi dan tindakan lanjutan terhadap PT Gag Nikel, sanksi yang diberikan mencakup evaluasi ketat atas dokumen lingkungan seperti AMDAL, penegakan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan, serta potensi pencabutan izin lingkungan jika terbukti melanggar aturan yang berlaku (Kementerian Lingkungan Hidup 2025).

Aktivitas tambang nikel di Raja Ampat telah menimbulkan dampak lingkungan yang sangat serius. Di Pulau Gag, eksploitasi nikel menyebabkan deforestasi besar-besaran terutama pada hutan mangrove dan hutan bakau yang menjadi penyangga ekosistem laut, pembukaan lahan di Pulau Gag yang lebih dari 187 hektar menciptakan erosi bagi terumbu karang dan ekosistem laut di sekitarnya (Maulana and Adiningsih 2025), di sisi yang sama eksploitasi nikel juga memerlukan pembukaan lahan dengan cara menebang hutan yang berakibat signifikan bagi kehidupan di Pulau Gag, seperti

menyebabkan erosi pada tanah, sedimentasi, serta kerusakan terumbu karang yang sangat vital bagi kehidupan di laut. Meskipun PT Gag Nikel telah melakukan upaya mitigasi seperti irigasi jalan dan pegadaan pengagkut sampah, namun dampak negatif terhadap lingkungan masih dirasakan. Masyarakat mengharapkan perusahaan untuk lebih aktif dalam berkomunikasi mengenai dampak lingkugan dan melibatkan mereka dalam upaya mitigasi (Ulat et al. 2024).

Dengan berbagai problematik yang terus-menerus akibat dari aktivitas tambang nikel muncul berbagi masalah, terlebih pada aspek sosial di masyarakat. Seperti masyarakat di Pulau Gag yang merupakan suku asli dari Papua yang sudah lama mendiami pulau tersebut. Masyarakat yang ada di Pulau Gag saat ini keberadaanya masih belum diakui secara resmi, maupun dipetakan dalam sistem Masyarakat Hukum Adat (MHA) di kawasan Raja Ampat, menurut (Sommaliagustina 2025), suara masyarakat adat mentok karena negara tidak pernah benar-benar mengakui posisi masyarakat adat sebagai subjek hukum yang setara, Undang-Undang masyarakat adat yang dijanjikan sejak era reformasi tak kunjung disahkan. Masyarakat di Pulau Gag mempunyai pola hidup yang sangat melekat dengan alam seperti nelayan dan juga petani musiman, namun karena kehadiran aktivitas tambang nikel membawa perubahan yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di Pulau Gag.

Pulau kawei, juga mengalami hal yang sama, namun di dalam operasinya PT KSM terbukti melakukan kegiatan eksploitasi di luar izin lingkungan dan kawasan perlindungan khusus hutan (PPKH) seluas 5 hektar yang berujung kepada rusaknya lingkungan yang ada di Pulau Kawei. Pada tanggal 10 Juni 2025 pemerintah resmi

mengumumkan Izin Usaha Pertambangan PT Kawei Sejahtera Mining dicabut yang diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (MENSESNEG) yaitu Prasetyo Hadi atas perintah dari Presiden Republik Indonesia (Tri Sulistiyono 2025), dengan adanya pencabutan ini semakin membuktikan kegiatan pertambangan nikel mengakibatkan berbagai macam permasalahan yang terjadi di Pulau Kawei, selain itu pemerintah mengharuskan PT KSM melakukan pemulihan lingkungan atau reklamasi serta bersiap menghadapi potensi gugatan perdata atas pelanggaran yang dilakukan. Sanksi ini tentunya sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023, yang menegaskan pelanggaran aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau kecil demi menjaga kelestarian lingkungan yang tak dapat dipulihkan serta prinsip keadilan antar generasi. Sehingga MK telah menerapkan putusannya yang mengatur bahwa dengan mengedepankan prinsip kepastian dan juga keadilan dalam hal perlindungan ekologi di wilayah pesisir tidak dapat diganggu gugat. Hal ini menandakan bahwasanya tidak ada toleransi dalam bentuk apapun, dengan alasan apapun untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah pesisir terutama pulau kecil (Silehu and Pratiwi 2025).

Problematika terus berlanjut di Pulau Kawei, aktivitas tambang nikel yang dilakukan oleh PT Kawei Sejahtera Mining menyebabkan kerusakan yang sama parahnya dengan Pulau Gag. Seperti pembukaan lahan yang melampaui batas izin, merusak kawasan perlindungan khusus di Raja Ampat sehingga memunculkan sedimentasi yang mengakibatkan penurunan kualitas perairan di sekitar pulau, kerusakan ekosistem di darat dan di pesisir laut, yang paling parah adalah mengancam

keanekaragaman hayati seperti ikan dan terumbu karang di sekitar Pulau Kawei. Nelayan tradisional melaporkan bahwa kebisingan dan getaran tambang menyebabkan hilangnya ikan yang penting bagi ketahanan pangan setempat (Laia 2025).

Pulau Kawei juga merasakan hal yang sama, meski masyarakat adat di Pulau Kawei sudah mendapatkan sistem Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan diakui sebagai masyarakat suku Betew dan Maya, mereka langsung menghadapi dampak sosial yang benar-benar serius dari eksploitasi nikel. Selain kerusakan alam, eksploitasi Sumber Daya Alam juga menimbulkan konflik sosial serius terutama menimpa masyarakat lokal. Aktivitas pertambangan dapat mengganggu dan menghilangkan mata pencaharian tradisional masyarakat yang bertumpu pada kelestarian ekosistem dan telah diwariskan turun-temurun (Batara 2025). Adanya aktivitas eksploitasi nikel di Pulau Kawei, melakukan pembukaan lahan secara besar-besaran membuat ancaman besar terhadap keberlanjutan dari ekosistem darat yang membuat berkurangnya mata pencaharian masyarakat terganggu di Pulau kawei.

Pulau Manuran, merupakan salah satu pusat eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat yang dikeruk oleh PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP) yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sekitar 1.173 hektar di Pulau Manuran, selama investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP) terbukti melakukan eksploitasi nikel di kawasan yang masuk dalam wilayah geopark Raja Ampat yang harus dilindungi secara ketat (Kompas 2025). Selain itu kolam pengendapan limbah (Settling Pond) yang dimiliki PT ASP terbukti jebol pada awal tahun 2025, menyebabkan pencemaran perairan serta

rusaknya ekosistem laut disekitar Pulau Manuran. Dengan adanya kejadian tersebut membuktikan bahwa pengelolaan limbah dan sistem manajemen lingkungan yang dibuat oleh PT ASP sangat tidak memadai, dan berbanding terbalik dengan keadaan Pulau Manuran yang lebih kecil dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi (Indah 2025).

Hal naas sangat terasa di Pulau Manuran, Pulau Manuran memiliki luas wilayah sekitar 746 hektar dengan daerah yang sangat kecil mengalami dampak lingkungan yang paling parah. Di dorong dari intensitas penambangan yang begitu tinggi dan jebolnya kolam pengendapan limbah di awal tahun 2025 menyebabkan pencemaran air laut dan kerusakan ekosistem di laut secara signifikan. Menurut Mahawan 2025 Kalau logam berat itu mengalir, kalau ada sungainya atau langsung ke pantai bisa mengancam terumbu karang, bisa terjadi pemutihan terumbu karang. Karena logam berat nikel itu sifatnya meningkatkan keasaman air laut, hal ini tentunya sejalan dengan insiden kebocoran kolam limbah di Pulau manuran. Kebocoran atau jebolnya kolam limbah memperlihatkan adanya bagian struktur kolam yang tidak tertutup maksimal sehingga limbah mengalir ke area yang lebih rendah dan akhirnya melimpas ke laut (Environment Institute 2025).

Hal yang signifikan akhirnya dirasakan oleh masyarakat yang ada di Pulau Manuran, aktivitas tambang nikel membawa perubahan besar pada ekosistem di Pulau Manuran, melihat hampir sebagian besar masyarakat di Pulau Manuran bergantung pada ekosistem yang ada di pesisir dan juga di laut. Masyarakat di Pulau Manuran mengalami penurunan kualitas terumbu karang serta mengakibatkan rendahnya

populasi biota laut seperti ikan kakap, kerapu dan lobster yang menjadi sumber mata pencaharian penting bagi masyarakat. Menurut (Noris 2025), salah satu dampak utama dari penambangan nikel adalah sedimentasi atau timbunan lumpur yang terbawa air hujan ke laut. Lumpur ini dapat membuat terumbu karang mati, menyebabkan ikan dan biota laut lainnya akan berkurang drastis. Proses reklamasi tentunya sudah dilakukan tetapi melihat besarnya kerusakan yang ada di dataran akibat dari deforestasi dan perubahan bentang lahan menyebabkan sampai saat ini belum mampu memulihkan kondisi alam di Pulau Manuran, selain itu melihat dari kerusakannya sudah mencapai tingkat yang sulit untuk dipulihkan sehingga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat, flora dan fauna endemik yang ada di Pulau Manuran.

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di Pulau Gag, Kawei dan Manuran sudah memiliki beberapa solusi yang telah dilakukan meliputi dari beberapa inisiasi, dimulai dari langkah advokasi dan protes yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang mendorong upaya penegakan hukum yang tegas dari pemerintah. Dikutip dari (Maulana 2025), masyarakat mendesak pemerintah untuk meninjau kembali izin tambang dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta menuntut transparansi akuntabilitas dari perusahaan dan pemerintah. Selain itu (Kementerian Lingkungan Hidup 2025), juga melakukan pengawasan ketat dari aktivitas tambang yang ada di ketiga pulau tersebut, evaluasi izin lingkungan dan meninjau kembali dokumen AMDAL di setiap daerah, sehingga dapat memerintahkan pemulihan ekologis demi mereklamasi ketiga pulau yang terdampak dari aktivitas eksploitasi nikel. Di Raja Ampat, masyarakat adat hidup dengan nilai-nilai kearifan

lokal yang kuat, termasuk hubungan spiritual dengan tanah dan laut. Masuknya tambang berpotensi memicu konflik horizontal antar warga, keretakan struktur sosial, hingga marginalisasi komunitas adat yang tidak memiliki posisi tawar kuat dalam negosiasi (Goodang 2025). Jika kerusakan ekologis akibat pertambangan nikel dibiarkan, bukan haya spesies endemik dan struktur terumbu karang yang akan musnah, tetapi juga sistem sosial - budaya masyarakat adat yang telah lama hidup selaras dengan alam (Rahma et al. 2025). Oleh karena itu, urgensi isu lingkungan di raja ampat bukan hanya menyangkut isu lingkugan semata, tetapi juga menyangkut keadilan ekologis dan hak masyarakat adat atas wilayah hidup mereka

Dengan adanya problematika tersebut sudah ada beberapa solusi yang meliputi dari pencabutan izin dari perusahaan PT Gag Nikel, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Anugerah Surya Pratama di waktu yang berdekatan. Menurut Bambang 2025, Raja Ampat bukan semata kawasan konservasi biasa, tetapi sebagai aset ekologis dunia yang wajib dijaga keberlanjutannya, beliau menegaskan pencabutan izin ini bukan titik akhir tetapi ada 2 langkah lanjutan atas keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah. Pertama, proses pemulihan ekologis di area bekas tambang dan yang kedua, evaluasi menyeluruh atas sistem pemberian izin tambang di kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil (Hukum Online 2025).

Selain itu pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga akan menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat Daya berbasis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menempatkan perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai prioritas. Penanganan ini

berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Kementerian Lingkungan Hidup 2025), dengan hal tersebut berujung pada upaya pemerintah untuk memerintahkan perusahan tambang untuk melakukan reklamasi lahan dengan harapan agar dapat memulihkan ekosistem. Ketiga Pulau ini tentunya menjadikan contoh nyata bagaimana aktivitas eksploitasi nikel di Raja Ampat merusak seluruh ekosistem yang ada di pulau, yang berujung pada ancaman jangka panjang mata pencaharian masyarakat, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan hidup serta lingkungan di Raja Ampat.

Meskipun berbagai upaya dari penanganan problematika isu lingkungan telah dilakukan, problematika isu lingkungan di Raja Ampat tidak dapat sepenuhnya terselesaikan hingga saat ini. Penambangan nikel berskala besar menimbulkan dampak ekologis serius seperti deforestasi, sedimentasi kelaut, polusi air dan udara, serta gangguan terhadap habitat satwa (Goodang 2025). Dengan masuknya tambang nikel di wilayah ini menandai babak baru eksploitasi sumber daya alam yang tidak hanya mengancam lingkungan, melainkan juga tatanan sosial masyarakat adat yang telah hidup harmonis selama bertahun-tahun bahkan berabad-abad (Yulianto 2025). Isu ligkungan di Raja Ampat ini bukan sekedar skanda lokal, ini adalah titik balik global yang menguji apakah ambisi ekonomi dapat berdampingan dengan integritas ekologi, Raja Ampat memaksa Indonesia untuk memilih atara keutungan mineral jangka pendek dan kewajibannya sebagai penjaga ekosistem yang tak tergantikan (Maspul 2025). Permasalahan ini mendapatkan banyak perhatian dari organisasi lingkungan dan masyarakat, melihat masa depan Raja Ampat bergantung pada keputusan yang diambil

pemerintah, hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian isu lingkungan di kawasan ini tidak bersifat instan berbeda dengan proses penambangannya, proses penyelesaian isu ini memerlukan kesabaran kolaborasi dan kebijakan yang berkepanjangan, partisipasi yang aktif dari berbagai pihak seperti masyarakat adat, pemerintah, sektor swasta, dan juga Organisasi Nonpemerintah (NGO) juga harus berperan aktif di dalam problematika ini (Aslami 2025). Seperti Greenpeace Indonesia yang mendesak pemerintah untuk meninjau kembali izin tambang di wilayah Raja Ampat, dibersamai dengan gerakan kampanye untuk meyuarakan dampak buruk dari pertambagan nkel yang sangat merusak ekosistem lingkungan di kawasan tersebut.

2.3 Greenpeace Indonesia di Raja Ampat

Banyak pihak telah menyoroti permasalahan ini, termasuk organisasi Greenpeace Indonesia Indonesia. Greenpeace Indonesia merupakan salah satu Organisasi Nonpemerintah yang berfokus pada kehutanan terutama pada deforestasi, energi yang mencakup transisi dari bahan bakar fosil, perubahan iklim, kebakaran hutan serta isu air dan kelautan. Secara garis besar Greenpeace Indonesia merupakan organisasi lingkungan hidup yang aktif dalam melakukan berbagai pergerakan mengenai isu-isu lingkungan yang ada di Indonesia.

Pergerakan Greenpeace Indonesia ini dipicu dan dimulai dari masyarakat lokal pada tahun 2021, yang dimana komunitas akar rumput seperti petani, warga desa dan nelayan merasakan kerusakan lingkungan di Pulau Gag. Hal ini pertama kali diungkap dalam investigasi Kompas di tanah Papua yang berlangsung di 20 kabupaten dan kota. Pada investigasi tersebut kondisi lingkungan di Raja Ampat benar-benar rusak, dimulai

dari perairan keruh, limbah menutupi terumbu karang, sampai kepada tangkapan ikan yang seharusnya mudah di dapat dipinggir dermaga mengharuskan masyarakat setempat harus melaut lebih jauh, untuk mendapatkan hasil laut yang biasanya mereka temukan dengan mudah. Setelah membaca keluhan masyarakat yang dikeluhkan oleh masyarakat yang ada di Raja Ampat melalui laporan dari Kompas, pada tahun 2022 akhirnya di respon dengan investigasi oleh Greenpeace Indonesia bersama LBH Papua Sorong dan WALHI Papua Barat. Pada saat investigasi lapangan tersebut Greenpeace Indonesia berdiskusi dengan masyarakat setempat dan menemukan hasil bahwa masyarakat lokal yang ada di Raja Ampat menolak kehadiran tambang nikel namun tidak di respon oleh pemerintah setempat (KompasTV Jambi 2025).

Greenpeace Indonesia sudah memasuk kepulauan Raja Ampat sejak tahun 2018, Kapal *Rainbow warrior* kembali hadir di Indonesia. Pada tahun ini kapal ini akan singgah ke beberapa pulau di Indonesia dengan tema “Jelajah Harmoni Nusantara", kapal Greenpeace *Rainbow warrior* berlayar selama 2 bulan di Indonesia dan akan menjadi perjalanan terlama yang pernah dilakukan oleh kapal tersebut. Pelayaran ini akan singgah pertama kali di Bumi Cendrawasih, tepatnya di Manokwari, dan kemudian akan berlayar ke Raja Ampat. Kunjungan ini tentunya untuk melakukan kampanye hutan dan laut di tanah Papua. Pada tahun 2018 bertepatan setelah pelayaran kapal *rainbow warrior* (Greenpeace Indonesia 2018).

Ekspedisi kembali dilakukan oleh Greenpeace Indonesia pada tahun 2022-2025 di Pulau Gag, Kawei dan Manuran, dan menemukan hasil deforestasi besar-besaran telah terjadi di ketiga pulau tersebut. Greenpeace Indonesia menemukan lebih dari 500

hektar hutan sudah di tebang demi kepentingan pertambagan, dan berujung kepada sedimentasi yang sangat parah terjadi sehingga berpotensi besar membunuh terumbu karang yang menjadi rumah bagi biota laut yang ada di sekitar pulau. Puncak dari ekspedisi dan investigasi ini akhirnya memunculkan hasil, di dorong dengan aksi protes besar-besaran yang di mulai oleh puluhan pimpinan masyarakat adat Suku Betew dan Maya dari 12 kampung di Distrik Waigeo Barat. Penolakan terhadap tambang nikel ini sangat tegas tertuang dalam sebuah petisi yag diserahkan kepada anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat pada 24 Maret 2025 (Redaksi Ekuatorial 2025).

Di pacu dengan organisasi pemuda adat yang tergabung dalam Aliansi Jaga Alam Raja Ampat (ALJARA) menolak tegas ekspansi dan ekspoitasi pertambangan nikel di Raja Ampat pada 26 Mei 2025, dalam aksi ini ALJARA mendesak pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat untuk menghentikan segala bentuk aktivitas tambang nikel dan berfokus pada melindungi kawasan konservasi dan destinasu wisata bahari (Ikbal Asra 2025). Dipicu dari gerakan masyarakat lokal Greenpeace Indonesia ikut meluncurkan report temuan dalam bentuk laporan dengan tema “Surga yang Hilang" di dalam laporan tersebut Greenpeace Indonesia memaparkan hasil temuan yang sangat luar biasa yang terdiri dari 12 jumlah izin pertambagan yang sebagian atau seluruh areanya berada di dalam Geopark UNESCO, 10 jumlah izin yang berada dalam kawasan konservasi atau hutan lindung, 5 jumlah izin pertambangan nikel yang aktif di Raja Ampat yang berada di 6 pulau yaitu Pulau Gag, Pulau Kawei, Pulau Manuran, Pulau Waiego, Pulau Manyaifun dan Pulau Batang Pele. Dengan rincian perizinan PT Gag Nikel memegang izin di Pulau Gag, PT Kawei Sejahtera Mining memegang izin

di Pulau Kawei, PT Anugerah Surya Pratama memegang izin di Pulau Manuran, PT Nurham memegang izin di Pulau Waigeo, dan PT Mulia Raimond Perkasa yang memegang izin di Pulau Manyaifun dan Pulau Batang Pele (Greenpeace Indonesia 2025). Di antara ke 6 pulau tersebut aktivitas pertambangan yang aktif sudah terjadi di Pulau Gag, Pulau Kawei dan Pulau Manuran. Aktivitas pertambangan seperti deforestasi besar-besaran sudah terjadi di ketiga pulau tersebut, sedangkan di Pulau Waiego, Pulau Manyaifun, dan Pulau Batang Pele belum terlihat pembukaan lahan untuk tambang walau sudah mulai muncul aktivitas pengeboran di beberapa titik.

Greenpeace Indonesia di Raja Ampat tentunya datang dengan membawa misi dan menargetkan isu lingkungan di Raja Ampat karena melihat ancaman yang sangat serius dari aktivitas pertambangan nikel yang mengancam ekosistem unik yang dimiliki oleh Raja Ampat itu sendiri. Menurut ketua tim kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Raja Ampat merupakan wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati darat maupun laut, dan banyak diantaranya bersifat endemik (Nurhidayat 2025). Di Raja Ampat juga dijuluki sebagai mahkota permata dan jantung dari segitiga karang, dengan keunikan tersebut membuat wilayah Raja Ampat ditetapkan sebagai Global Geopark pada tahun 2023 dan sekarang sedang diusulkan menjadi situs warisan dunia. Dengan hal tersebut semakin jelas bahwa Greenpeace Indonesia terus menerus memantau perkembangan lingkungan yang ada di Raja Ampat agar tidak semakin rusak. Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah meninjau kembali izin tambang di wilayah konservasi seperti Raja Ampat dan meningkatkan pengawasan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan (Noris 2025).

BAB 3

PERAN GREENPEACE INDONESIA DALAM ISU LIGKUNGAN DI RAJA AMPAT

3.1. Peran Greenpeace Indonesia sebagai *Service Delivery/implementers*

Organisasi Nonpemerintah seperti Greenpeace sering bertindak sebagai penyedia layanan atau pelaksana yang mengisi kekosongan kapasitas negara dalam berbagai bidang. Seperti yang dikemukakan oleh (Lewis dan Kanji, 2009) "Peran pelaksana berfokus pada mobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang membutuhkan", hal ini tentunya menjadi peran yang sangat efektif jika melihat dari isu lingkungan yang ada di Raja Ampat. Selain itu "Peran penyampaian layanan mencakup berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Nonpemerintah di bidang-bidang yang beragam, seperti kesehatan, mikrofinansial, pertanian, penyuluhan, bantuan darurat, dan hak asasi manusia (Lewis and Kanji 2009). Pernyataan ini semakin menunjukan bahwa peran strategis dari Greenpeace Indonesia di dalam isu lingkungan di Raja Ampat sangat-sangat penting.

Greenpeace Indonesia menunjukan peran sebagai *service delivery* atau *implementers* dalam isu lingkungan di Raja Ampat pada periode 2022-2025, berfokus pada kerangka pemikiran yang dikemukakan oleh David Lewis dan Nazneen Kanji yang mendefinisikan Organisasi Nonpemerintah sebagai pelaksana layanan langsung untuk mengisi celah kosong dari negara yang belum memenuhi kapasitas (Lewis and Kanji 2009). Peran pelaksana Greenpeace Indonesia dalam isu lingkungan di Raja Ampat diwujudkan melalui mobilisasi sumber daya organisasi untuk menjalankan

kampanye lingkungan, produksi dan distribusi pengetahuan terkait kondisi lingkungan di Raja Ampat. Dalam konteks Hubungan Internasional, aktivitas Greenpeace Indonesia mencerminkan bagaimana dinamika aktor organisasi non-negara yang beroperasi dengan pengalaman internasional yang bisa diadaptasi ke level lokal. Meskipun tidak berperan sebaga peyedia layanan material secara langsung, Greenpeace Indoesia menjalankan fungsi pelaksana dalam bentuk penyediaan jasa dan informasi lingkungan yang bertujuan untuk melidungi ekosistem di Raja Ampat

Greenpeace Indonesia melakukan riset dan investigasi yang menemukan hasil deforestasi besar-besaran seluas 500 hektar hutan serta sedimentasi parah yang sangat mematikan bagi terumbu karang yang menjadi rumah bagi 75% spesies karang dan biota laut yang ada di dunia (Greenpeace Indonesia 2025). Greenpeace Indonesia menjelajah Papua barat Daya untuk melihat deforestasi besar-besaran yang ada di Raja Ampat, dan hal ini membuat Greenpeace Indonesia melakukan pengukuran langsung limpasan tanah dari galian terbuka, dan mendapatkan hasil data kadar nikel di air pesisir >10x batas aman yang tentunya mengancam lebih dari 2.500 spesies ikan yang ada di sekitar.

Selain itu Greenpeace juga meyediakan laporan, data dan visualisasi kerusakan yang terjadi akibat tambang nikel di Raja Ampat, hasil survei yang dikeluarkan oleh Greenpeace juga melibatkan tim lapangan yang mengintegrasikan analisis citra satelit Landsat 9 dengan pengamatan langsung menggunakan drone dan sampel air laut di Pulau Manuran, yang mengungkapkan kadar logam berat seperti nikel dan kromium yang melebihi ambang batas aman untuk ekosistem terumbu karang (Greenpeace

Indonesia 2022). Aktivitas ini tidak sepenuhnya menggamarkan peran Greenpeace Indonesia sebagai *service delivery/implementers* yang dikemukakan oleh David Lewis dan Nazneen Kanji yang dimana Organisasi Nonpemerintah bertindak sebagai penyedia layanan. Namun Greenpeace Indonesia berperan sebagai penyampai layanan di bidang hak asasi manusia dan juga lingkungan lewat laporan "Surga yang hilang? Raja Ampat" pada bulan Juni 2025 menjadi bukti utama, mengungkapkan 16 izin usaha pertambangan (IUP) nikel di kawasan Geopark UNESCO (Greenpeace Indonesia 2025).

Greenpeace Indonesia memantau pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada bulan Juni 2025, Greenpeace Indonesia juga menuntut pemerintah untuk menerbitkan surat keputusan resmi yang transparan dan mendorong pemulihan fungsi ekosistem hutan serta pesisir, didorong dengan petisi yang #SaveRajaAmpat yang dibuat oleh Greenpeace Indonesia yang mendapatkan 60.000 petisi dari masyarakat luas, hal ini didorong dengan mengingat 47 spesies mamalia dan 274 spesies burung yang ada di daratan Raja Ampat (Greenpeace Indonesia 2025). Aktivitas kampanye publik seperti #SaveRajaAmpat, edukasi masyarakat tentang dampak ekologis tambang dan solusi melalui media sosial merupakan bentuk penyuluhan lingkungan yang di lakukan oleh Greenpeace Indonesia.

Tidak berhenti disitu Greenpeace Indonesia mengangkat suara masyarakat adat di Raja Ampat dengan memberikan pelatihan *story telling* kepada anak muda adat Papua, seperti dalam Makassar International Writers Fesrivals Festival (MIWF) pada tahun 2025, yang dimana 5 anak muda serta relawan lokal dilatih menggunakan *mop*

tradisional dan film untuk bisa menyuarakan perampasan tanah mereka oleh perusahan nikel yang beroperasi (Greenpeace Indonesia 2025). Dengan didorong berbagai hal di atas Greenpeace Indonesia juga semakin aktif dengan memfasilitasi dialog antara masyarakat/komunitas lokal, termasuk dukungan keamanan bagi aktivis pasca protes berlangsung (Greenpeace Indonesia 2025). Hal ini tentunya dapat dikategorikan sebagai layanan di bidang Hak Asasi Manusia yang mengedepankan perlindungan hak atas lingkungan hidup. Meski bukan bantuan darurat seperti bencana alam, Greenpeace Indonesia membigkai tambang nikel sebagai ancaman yang sangat serius terhadap ekosistem di Raja Ampat, hal ini merupaka bentuk respon terhadap kondisi darurat berbasis lingkungan.

Dapat dilihat bahwa Greenpeace Indonesia menjalankan peran *service delivery* non-material terkhusus mpada penyediaan informasi melalui riset dan investigasi, edukasi publik mengenai dampak dari tambang nikel dan dukungan masyarakat lokal dalam memperjuagkan hak atas lingkungan hidup di tanah mereka. Dengan demikian, Greenpeace Indonesia tetap menjalankan fungsi pelaksana, meskipun dalam bentuk non-material.

3.2 Peran Greenpeace Indonesia sebagai *Catalyst*

Greenpeace Indonesia memainkan peran yang sangat baik di dalam peran *catalyst* atau yang bisa disebut pemicu perubahan. Berbeda dengan *service delivery/implementers* yang bersifat operasional teknis, peran *catalyst* yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia terwujud dari berbagai inovasi dan kombinasi canggih yang menggunakan advokasi sebagai strategi utama dalam pergerakannya. Aksi-aksi yang

dilancarkan oleh Greenpeace Indonesia mempunyai risiko tinggi di beberapa momen yang sangat krusial di Indonesia, laporan-laporan yang disusun sangat sistematis dan mempunyai bukti yang sangat akurat, yang berujung kepada pencabutan Izin Usaha Tambang (IUP) dari 4 perusahaan dicabut pada bulan Juni 2025.

Catalyst biasanya dipahami sebagai orang atau benda yang memicu perubahan. Peran *catalyst* dapat didefinisikan sebagai kemampuan Organisasi Nonpemerintah untuk menginspirasi, memfasilitasi atau berkontribusi pada pemikiran dan tindakan yang lebih baik guna mendorong perubahan (Lewis and Kanji 2009). Selain itu juga menyebutkan, hal ini dapat mencakup organisasi akar rumput dan pembentukan kelompok, pekerjaan terkait gender dan pemberdayaan, lobi dan advokasi, pelaksanaan dan penyebaran penelitian, serta upaya untuk mempengaruhi proses kebijakan yang lebih luas melalui inovasi dan kewirausahaan kebijakan (Lewis and Kanji 2009). Dengan pembahasan serta penjabaran yang dikemukakan oleh David Lewis dan Nazneen Kanji pada tahun 2009, akan semakin memperjelas bahwa pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia mengambil peran sebagai *catalyst* didalam isu lingkungan yang terjadi di Raja Ampat terlebih pada ketiga pulau yaitu Pulau Gag, Pulau Kawei, dan Pulau Manuran.

Greenpeace Indonesia memulai ini dengan mengumpulkan data lapangan faktual untuk menyusun laporan komprehensif tentang kerusakan geologis yag disebabkan oleh aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Lamporan ini kemudian menjadi alat utama untuk membangun momentum dalam kampanye publik dengan memanfaatkan plaform digital (Santioso and Sinaga 2025). Pergerakan Greenpeace

Indonesia dimulai dengan meluncurkan petisi online dengan tagar #SaveRaajaAmpat (Greenpeace Indonesia 2025) pada Juni 2025, yang secara langsung berkembang berhasil mengumpulkan 60.000 tanda tangan dalam 28 hari, petisi online ini tentunya menargetkan pencabutan seluruh 16 Izin Usaha Tambang (IUP) nikel di kawasan geopark UNESCO yaitu Raja Ampat yang tentunya mengancam biawak waigeo, udang mantis merak, hiu karpet, lebih 540 spesies ikan, 75% spesies karang dunia, dan 500+ hektar hutan yang di tebang. Petisi dan kampanye ini sangat luar biasa, mengemas narasi “Surga Terakhir Bumi" memadukan visual yang memperlihatkan deforestasi besar-besaran, mengakibatkan sedimentasi dan terbunuhnya terumbu karang di sekitar pulau-pulau yang memiliki aktivitas tambang di Raja Ampat. Dengan menerbitkan petisi tersebut Greenpeace Indonesia mengangkat isu tambang nikel di Raja Ampat ke level nasional dan global untuk membangun opini publik, hal ini tentuya menginspirasi perubahan pemikiran serta kesadaran masyarakat mengenai isu lingkungan di Raja Ampat. Serta memfasilitasi tindakan kolektif demi perubahan sosial.

Hal ini semakin menarik ketika Greenpeace Indonesia merilis video youtube yang berjudul "Wajah Lain Raja Ampat dan Potret Tanah Papua Terkini!” Pada 3 Mei 2025 yang saat ini sudah mencapai 897.559 penayangan di channel mereka, setelah itu disusul dengan petisi online dengan tagar #SaveRajaAmpat berbarengan dengan aksi damai “Kritik Industrial Nikel” yang dilakukan saat konferensi nikel internasional di Jakarta pada 3-5 Juni 2025 (Greenpeace Indonesia 2025). Saat itu 9 aktivis Greenpeace Indonesia secara bersamaan membentangkan 3 banner raksasa dengan ukuran 3x5 meter bertuliskan.

Gambar 4 Save Raja Ampat From Nickel Mining



Sumber : Greenpeace Indonesia (2025)

Gambar 5 Nickel Mines Destroy Lives



Sumber : Greenpeace Indonesia (2025)

Gambar 6 Whats The True Coast Of Your Nickel?



Sumber : Greenpeace Indonesia (2025)

Berbarengan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury berpidato mengenai nikel Indonesia untuk transisi energi global. Aksi ini berisiko tinggi dan dampak yang sangat luar biasa, tentunya sebanding dengan fakta empiris mulai dari deforestasi 500+ hektar di Pulau Gag, Kawei, dan Manuran, sedimentasi melebihi batas aman, dan berbagai pelanggaran AMDAL yang dilakukan oleh penambang nikel di Raja Ampat (Greenpeace Indonesia 2025). Greenpeace Indonesia bukan hanya bergerak pada mobilisasi massa melalui petisi digital dan aksi protes, tetapi juga terbukti medesak penghentian tambang dan mengkritik kebijakan yang mengizinkan ekploitasi dan bentuk ini jelas menggambarkan lobi dan advokasi untuk mempengaruhi kebijakan serta mendorong evaluasi izin tambang.

Pada bulan Mei 2025, Greenpeace di channel youtube nya mengunggah sebuah video yang menggambarkan bagaimana kondisi di Raja Ampat saat itu. Gebrakan itu tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai apa yang terjadi pada Raja Ampat, dengan memanfaatkan isu yang masih hangat Greenpeace Indonesia pada awal

bulan Juni melancarkan aksi keduanya melalui petisi #SaveRajaAmpat yang benar-benar menarik perhatian hampir seluruh masyarakat Indonesia gerakan ini memproduksi pengetahuan sehigga Greenpeace dapat mengubah opini menjadi data untuk mendorong perubahan. Tidak sampai disitu, di bulan yang sama Greenpeace Indonesia memfasilitasi gerakan akar rumput yaitu dengan beberapa pemuda asli Papua melakukan aksi damai di dalam acara konferensi nikel internasional yang diadakan di Jakarta pada 3 Juni 2025 (Supiyanto 2025), hal yang Greenpeace Indonesia lakukan mencerminkan pengorganisasian akar rumput dan pembentukan jaringan. Dengan ini Greenpeace Indonesia menjalankan peran sebagai *catalyst* dengan menginspirasi dan memobilisasi kesadaran publik melalui kampanye lingkungan, melakukan advokasi dan tekanan utuk merubah kebijakan serta memfasilitasi penguatan gerakan masyarakat lokal dalam aksi kolektif. Dan hal ini membuahkan hasil dengan respon cepat pemerintah yang mencopot 4 IUP.

3.3 Peran Greenpeace Indonesia sebagai *Partnership*

Peran yang diambil oleh Greenpeace Indonesia di Raja Ampat terlebih pada periode 2022-2025. Berbeda dengan peran *catalyst*, pada peran ini Greenpeace Indonesia menjalin kerjasama dengan berbagai aktor. Greenpeace Indonesia membangun jaringan *Partnership* yang sangat strategis sejak 2022 untuk menangani isu tambang nikel di Raja Ampat, Greenpeace Indonesia melibatkan aktor-aktor dari tahun 2022 yang awal hanya melakukan monitoring menjadi dialog yang benar-benar formal pada tahun 2025.

Di dalam buku *Non-Governmental Organization and Development* menjelaskan bahwa ”Seorang mitra, bekerjasama dengan pihak lain dan berbagi risiko atau manfaat dari usaha bersama” (Lewis and Kanji 2009). Selain itu Peran mitra mencerminkan tren yang semakin berkembang bagi Organisasi Nonpemerintah seperti Greenpeace Indonesia untuk bekerjasama dengan pemerintah, donatur, dan sektor swasta dalam kegiatan bersama, seperti memberikan kontribusi spesifik dalam program atau proyek multi-lembaga yang lebih luas. Dapat diartikan bahwa peran *Partnership* mengambil peran penting agar setiap pergerakan yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia di dalam isu lingkungan di Raja Ampat semakin efektif dalam menjalankan seluruh rangkaian kegiatannya. Greenpeace Indonesia sampai saat ini berhasil membangun empat partnership strategis yang sudah saya temukan melalui berbagai literatur terkait isu lingkungan di Raja Ampat, hal ini semakin menunjukan pendekatan kolaboratif yang melengkapi kampanye yang sangat berani dan cukup aktif dari Greenpeace Indonesia itu sendiri. Peran *partnership* ini melibatkan aktor lokal, komunitas agama, dan lembaga masyarakat adat dan semuanya demi bertujuan untuk masa depan yang lebih baik di Raja Ampat. Di dalam peran *partnership* ini Greenpeace menajalankan peran kerjasama secara selektif terutama dengan komunitas lokal maupun lembaga swadaya masyarakat dibandingkan dengan pemerintah dan sektor swasta.

Pada tahun 2022 Greenpeace Indonesia melakukan kerjasama dengan LBH Papua Sorong dan WALHI Papua Barat melakukan *joint field investigation* atau melakukan investigasi di lapangan bersama-sama dan mendokumentasikan deforestasi

150 hektar dan sedimentasi awal. Kolaborasi ini memunculkan hasil laporan bersama ancaman awal nikel Raja Ampat pada bulan Desember 2022, yang diserahkan kepada Bupati Raja Ampat pada bulan Januari 2023 (Jong 2022). Tidak berhenti disitu Greenpeace Indonesia melakukan kerjasama dengan Pioneer Tanah Papua, yang mengajak para pemuda untuk menonton film demi melakukan kampanye hutan adat agar bisa dijaga oleh generasi selanjutnya. Pada saat acara tersebut juga dihadiri oleh juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia Papua Barat yaitu Amos Sumbang. Menurut Amos, ketidak berdayaan masyarakat mempertahankan hutan adat dari deforestasi karena keberadaan pemimpin adat seperti kepala suku belum dilegitimasi. “Kita butuh anak muda yang berjuang dan mampu menyuarakan ini. Tidak haya terlena dengan status afirmasi dan dana OTSUS/Otonomi Khusus (Pasa 2023). Kerjasama ini sesuai dengan kotribusi spesifik dalam program atau proyek multi lembaga bersama organisasi masyarakat sipil dalam kemitraan advokasi dan bantuan hukum di tingkat nasional.

Tidak berhenti disitu, pada Juni 2025 Greenpeace Indonesia juga menginisiasi pergerakan dengan melakukan pertemuan bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Beberapa relawan Greenpeace Indonesia melakukan pertemuan dengan Sekretaris Umum PGI Pdt. Darwin Darmawan dan Kabiro litbang PGI yaitu Alfian R. Komimbin, tujuan Greenpeace dalam pertemuan tersebut tentunya sejalan dengan aksi-aksi yang sudah dilakukan yaitu untuk perlindungan di Raja Ampat. Pada kesempatan kali ini Greenpeace Indonesia mengajak PGI untuk bersama-sama memperjuangkan dan mengawal hingga tuntas perlindungan utuh dan permanen terkait

Raja Ampat. Hal ini tentunya meliputi perlindungan dari tambang yang merusak lingkungan, perlindungan kepada masyarakat adat, serta perlindungan untuk ekonomi berkelanjutan yang berbasis *ecotourism* dan perikanan. Menurut Director Greenpeace Indonesia yaitu Leonard Simanjuntak, hal ini penting dilakukan memandang institusi agama seperti PGI, sangat memainkan peran penting dalam masyarakat di Indonesia yang sangat religius, untuk bersama-sama memerangi persoalan-persoalan semacam ini (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia 2025). Setelah pertemuan tersebut PGI mengeluarkan tuntutan formal antara lain: (a) Tambang patuhi *Free informed Consent* (FPIC) adat, (b) Pemerintah patuhi UU NO.1/2014 Pesisir-Pulau Kecil, dan (c) Gereja jadi teladan pertobatan ekologis. Hal ini tentunya memperkuat narasi Greenpeace Indonesia bahwa Raja Ampat bukan hanya *biodiversity hotspot,* tetapi juga warisan spiritual di Papua. Dalam kerjasama ini Greenpeace melakukan kemitraan dengan organisasi keagamaan demi membangun kesadaran lingkugan berbasis agama serta menjangkau komunitas akar rumput melalui institusi keagamaan yang dapat memperluas pengaruh Greenpeace ke ranah sosial dan keagamaan.

Greenpeace Indonesia juga mengadakan *Forest Defender Camp Sorong* pada tanggal 23-25 September 2025 yang lalu, di dalam acara ini ini juga dibersamai oleh WALHI Papua, LBH Papua sorong Sadir Wet Yifi dan Bentara Papua, yang dimana mereka berkolaborasi kembali dengan Greenpeace Indonesia untuk menyelamatkan hutan yang di Raja Ampat. Pada acara ini Greenpeace Indonesia mengadakan acara kemah untuk anak muda adat di Papua dan berhasil mengajak 100 anak muda adat Papua untuk berkumpul di hutan desa milik masyarakat adat Tehit Knasaimos di

Kampung Manggroholo-sira, Distrik Saifi, Sorong Selatan, Papua Barat Daya. *Forest Defender Camp* diharapkan hadir untuk memperkuat gerakan dan mengkampanyekan hak-hak dari Masyarakat Adat (Greenpeace Indonesia 2025). Di sisi lain acara kemah ini juga diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk membangun solidaritas global dikarenakan acara ini juga dihadiri oleh perwakilan masyarakat adat dari Cekungan Kongo, Amazon dan Borneo yang ikut membagikan pengalaman di daerah mereka masing-masing. Pada acara ini anak muda adat menuntut penghentian praktik deforestasi, ekspansi industri bahan bakar fosil, pertambangan, dan aktivitas merusak lainnya di wilayah adat dan semua itu kemas di dalam Deklarasi Sira yang lahir karena minimnya peraturan yang melindungi hak-hak masyarakat adat (Nurhadi 2025).

Pergerakan berbasis kolaborasi terus dilakukan oleh Greenpeace Indonesia kali ini merangkul Makassar International Writers Festival 2025, pada acara ini Greenpeace Indonesia melatih 25 aktivis muda dari masyarakat adat di Pulau Gag, Kawei, dan Manuran untuk bersuara di ranah Internasional. Dengan adanya kolaborasi ini tentunya semakin mempertegas peran Greenpeace Indonesia untuk meningkatkan kapasitas masyarakat adat dalam perlindungan ekosistem di Raja Ampat dari aktivitas tambang nikel. Pada MIWF 2025 mengambil makna *town hall,* yang sangat urbanis direbut kembali oleh anak-anak muda adat Papua, mereka datang dengan berpakaian adat, siap membagikan cerita tentang pembangunan yang merusak, perampasan tanah adat secara paksa, dan relasi kuat masyarakat adat dengan wilayah kehidupannya yang tidak dipahami oleh masyarakat di luar komunitas (Alvionita 2025). Pada kerjasama ini membuahkan sebuah karya yag berjudul “Cerita dari Perbatasan Liar” yang didalam

nya adalah suara dari anak muda di Raja Ampat yag mempresentasikan narasi tentang deforestasi, menggusur tanah ulayat dan mengubah persepsi sastra dari estetika menjadi advokasi lingkungan. Dengan melakukan kemitraan dalam bidang pengetahuan dan kesadaran dengan pendekatan karya sastra untuk membentuk wacana publik dan budaya.

Kolaborasi-kolaborasi yang dijalankan Greenpeace Indonesia bersifat multidimensional dengan LBH serta WALHI memberikan legitimasi hukum lokal yang ada sebagai mitra dari advokasi dan organiasi masyarakat hukum, Forest Defender Camp memperkuat monitoring lapangan, kemitraan berbabis komunitas dengan institusi keagamaan seperti PGI yang membawa dimensi agama, dan yang terakhir dengan aktor budaya yaitu MIWF memberdayakan aktivis muda untuk forum internasional. Kerjasama ini menunjukan bahwa Greenpeace Indonesia tidak bergantung pada satu jenis aktor, melainkan mengembangkan jaringan kolaborasi yang luas sehingga memperkuat dalam isu lingkungan di Raja Ampat.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Raja Ampat, kepulauan di Papua Barat Daya yang dijuluki “Surga Terakhir di Bumi” karena keanekaragaman hayati dan hutan tropis yang sangat luar biasa, kini menghadapi krisis ekologis dan sosial akibat dari eksploitasi tambang nikel. Pulau Gag mengalami pembukaan lahan sekitar 187,87 hektar di hutan lindung dan geopark, yang

secara signifikan menyebabkan deforestasi besar-besaran yang bisa dideteksi melalui analisis satelit, selain itu erosi tanah dan sedimentasi berat pasca hujan yang melanda Pulau Gag juga sangat mengancam terumbu karang yang menjadi rumah bagi biota laut yang ada di sekitar pulau itu. PT Gag Nikel beroperasi dengan izin tambang terbuka di kawasan hutan lindung, yang berujung kepada menghasilkan limbah kimia yang sangat mencemari perairan pesisir dan hutan mangrove, tentunya hal ini sangat vital dan berbahaya bagi kestabilan ekosistem yang ada di Pulau Gag dan yang ada di sekitarnya. Tidak hanya di Pulau Gag, hal yang sama juga terjadi di Pulau Kawei dengan Izin Pinjam Kawasan Hutan (IPPKH) 2022, mengalami eksploitasi yang sangat luar biasa, ditambah dengan eksploitasi yang dilakukan oleh PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM) di luar batas izin yang sudah di keluarkan. Disisi lain hal yang lebih naas terjadi di Pulau Manuran, izin tambang yang diberikan kepada PT Anugerah Surya Pratama melebihi luas pulau itu sendiri, ditambah dengan insiden jebolnya settling pond pada bulan Juni 2025 yang memicu pencemaran logam berat ke laut yang menyebabkan pemutihan terumbu karang dan kematian biota laut di sekitar Pulau Manuran. Secara keseluruhan, perubahan tutupan lahan pada periode 2022-2025 mencerminkan kerusakan yang sangat kompleks terjadi di Raja Ampat.

Problematika isu lingkungan di Raja Ampat diawali dengan keresahan masyarakat yang ada di Pulau Gag, dengan adanya aktivitas pertambangan aktor masyarakat merasakan dampak langsung dari aktivitas pertambangan mulai dari petani, nelayan, dan masyarakat lokal. Investigasi dari Kompas pada tahun 2021 membawa suara masyarakat di Pulau Gag yang tidak membuahkan hasil menjadi sebuah laporan

investigasi yang dikeluarkan pada tahun 2022. laporan tersebut menjadi titik awal pergerakan Greenpeace Indonesia untuk terjun melakukan investigasi bersama dengan LBH Papua Sorong dan WALHI Papua Barat, dan menemukan bukti deforestasi besar-besaran yang sudah memakan tutupan lahan yang ada di Pulau Gag serta keluhan masyarakat mengenai pencemaran yang ada di sekitar Pulau Gag, sehingga menyulitkan para petani untuk menanam dan nelayan untuk menangkap ikan. Hal ini menjadi dorongan Greenpeace Indonesia untuk terus melakukan investigasi di Pulau Kawei dan Manuran.

Puncak dari ekspedisi dan investigasi ini akhirnya memunculkan hasil, di dorong dengan aksi protes besar-besaran yang di mulai oleh puluhan pimpinan masyarakat adat Suku Betew dan Maya dari 12 kampung di Distrik Waigeo Barat. Penolakan terhadap tambang nikel ini sangat tegas tertuang dalam sebuah petisi yag diserahkan kepada anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat pada 24 Maret 2025. Hal ini didukung oleh Greenpeace Indonesia dengan mengedepankan peran *service delivery/implementers* kedalam bentuk non-material. Peran ini diwujudka melalui mobilisasi sumber daya organisasi untuk menghasilkan data melalui riset dan investigasi dan menyediakan informasi lingkungan yang aktual. Di dorong dengan data serta informasi tersebut, Greenepeace Indonesia juga turut aktif dalam edukasi publik, kampanye lingkungan seperti #SaveRajaAmpat dengan melibatkan masyarakat lokal. Meskipun tidak memberikan layanan material secara langsung, namun aktivitas dari Greenpeace Indonesia tetap mencerminkan fungsi pelaksana, terkhusus dalam penyediaan jasa berupa pengetahuan, peningkatan kesadaran, serta fasilitas informasi

dan ruang dialog antara masyarakat lokal serta pihak yang bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan di Raja Ampat.

Pada problematika isu lingkungan di Raja Ampat, Greenpeace Indonesia juga melakukan peran sebagai *catalyst* yang bertujuan untuk memicu perubahan dalam isu lingkungan di Raja Ampat. Peran ini terwujud melalui berbagai macam cara mulai dari advokasi inovatif, aksi damai yang berisiko tinggi, diplomasi transnasional yang secara langsung memicu pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 4 perusahaan pada bulan Juni 2025. Dengan didorong dari petisi yang dibuat oleh Greenpeace indonesia #SaveRajaAmpat yang mendapatkan 60.000 tanda tangan masyarakat luas berujung kepada menciptakan tekanan publik yang masif terhadap negara untuk langsung bertindak tegas. Dengan petisi tersebut juga terbukti berhasil menarik seluruh mata tertuju kepada problematika isu lingkungan di Raja Ampat.

Greenpeace Indonesia juga melakukan peran yang sangat strategis sebagai *partnership* atau mitra kolaboratif dalam isu lingkungan di Raja Ampat, peran ini tentunya melengkapi kepingan yang masih kurang dari *service delivery/implementers* dan *catalyst,* sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh David Lewis dan Nazneen Kanji di dalam buku *Non-Governmental Organization and Development*. Hal ini tentunya semakin baik melihat dari kegiatan yang dilakukan antara Greenpeace Indonesia dengan mitra dapat memberikan kontribusi yang nyata dan spesifik di dalam pergerakan yang mereka jalankan. Pada isu lingkungan kali ini Greenpeace Indonesia menjalin kolaborasi dengan berbagai mitra mulai dari LBH Papua, WALHI, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), *Makassar International Writers Festival*, sampai

komunitas adat yang bertujuan untuk menghasilkan tekanan-tekanan kolektif yang lebih efektif dibandingkan aksi tunggal. Dengan peran ini tentunya semakin semakin memperlihatkan bahwa Greenpeace Indonesia bukan hanya sekedar koordinasi taktis, melainkan arsitektur dari problematika isu yang ada di Raja Ampat.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai problematika lingkungan akibat eksploitasi nikel di Raja Ampat, serta peran Greenpeace Indonesia dalam bingkai teori *Non-Governmental Organization and Development* yang meliputi peran *service delivery/implementers, catalyst,* dan *partnership.* Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk penelitian seanjutnya. Pertama, perluas periode analisis yang dimana dapat melampirkan data terkini dari perkembangan isu lingkungan di Raja Ampat, yang dimana bisa berfokus pada implementasi dar pencabutan IUP sementara dari perusahaan-perusahaan tambang diatas yang memungkinkan peneliti mengevaluasi efektivitas peran dari Greenpeace Inodonesia.

Kedua, tingkatkan bagian Hak Asasi Manusia yang dipadukan dengan studi hubungan internasional yang bisa memadukan antara peran Greenpeace Indonesia dengan norma Hak Asasi Manusia di ranah internasional. Ketiga, peneliti maupun akademisi diharapkan juga mengambil peran besar untuk mengkaji secara kritis peran dan konstruktif arah dari aktor-aktor yang ada di Indonesia dalam isu lingkungan di Raja Ampat. Kajian skripsi akademik pun sangat penting karena dapat memberikan masukan-masukan untuk pembuat kebijakan, oleh karena itu perlu dikembangkan ekosistem riset maupun berbagai hal yang mendukung kajian lingkungan dan

diplomasi yang strategis agar dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Keempat dan yang terakhir, peneliti selanjutnya bisa membandingkan efektivitas peran Greenpeace Indoesia dengan NGO internasional atau lokal seperti, Amnesty, WALHI dan sebagainya. Diharpkan dapat membuat sudut pandang baru mengenai kefektifitasan peran dari NGO internasional maupun lokal yang dapat melahirkan analisis dengan pemahaman mendalam tentang dinamika NGO transnasional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alif Al Hikam, Herdi. 2025. "Gag Nikel Buka Suara Soal Operasi Tambang Di Raja Ampat." Detik.Com. June 9, 2025. https://finance.detik.com/energi/d-7956022/gag-nikel-buka-suara-soal-operasi-tambang-di-raja-ampat.

Alvionita, Agnes. 2025. "Greenpeace Dan Anak Muda Adat Papua Di MIWF 2025 - Greenpeace Indonesia." Greenpeace.Org. June 27, 2025. https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/63696/cerita-cerita-dari-perbatasan-yang-liar-anak-muda-adat-papua-di-miwf-2025/.

Ambari, M. 2022. "Bersatunya Kegiatan Ekonomi Dan Ekologi Di Raja Ampat." February 26, 2022. https://mongabay.co.id/2022/08/26/bersatunya-kegiatan-ekonomi-dan-ekologi-di-raja-ampat/.

Ariyanto, Nadisa Shafira. 2025. "Article History:KAJIAN PERAN ECCO FOUNDATION DALAMMENCAPAI SDGS PILAR 11 DAN 13 DI DESA GENGGELANG MELALUI PROGRAM 5P YOUTH CAMPUS." *JURNAL ILMU SOSIAL DAN PENDIDIKAN LICHEN INSTITUT* 1 (3): 27–38. https://jurnal.licheninstitute.org/index.php/jiseli/article/view/228.

Aslami, Najwa. 2025. "RAJA AMPAT: SURGA TERAKHIR YANG TERANCAM - LK2 FHUI." Llk2fhui.Law.Ui.Ac.Id. 2025. https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/raja-ampat-surga-terakhir-yang-terancam/.

Asnawi, A., and Riza Salman. 2025. "Tambang Nikel Raja Ampat, Kerusakan Tak Bakal Pulih." Mongabay.Co.Id. June 8, 2025. https://mongabay.co.id/2025/06/08/tambang-nikel-raja-ampat-kerusakan-tak-bakal-pulih/.

B. MILES, MATTHEW, and A. MICHAEL HUBERMAN. 2014. “Qualitative Data Analysis.” *CEUR Workshop Proceedings*. chrome-extension://kdpelmjpfafjppnhbloffcjpeomlnpah/https://vivauniversity.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/11/milesandhuberman1994.pdf.

Batara, Andi. 2025. “Tambang Nikel Raja Ampat Dan Dampak Eksploitasi Sumber Daya Alam - Green Network Asia - Indonesia.” Greennetwork.Id. June 19, 2025. https://greennetwork.id/gna-knowledge-hub/tambang-nikel-raja-ampat-dan-dampak-eksploitasi-sumber-daya-alam/.

CA, Sacramento. 2025. “Tambang Nikel Di Raja Ampat Terbukti Merusak Lingkungan Dan Terumbu Karang.” Wallacea.Id. September 25, 2025. https://wallacea.id/id/news/79/tambang-nikel-di-raja-ampat-terbukti-merusak-lingkungan-dan-terumbu-karang.

Dwi Saputra, Melynda. 2025. “Profil Lima Perusahaan Pemilik Izin Usaha Tambang Nikel Raja Ampat | Tempo.Co.” Tempo.Co. June 9, 2025. https://www.tempo.co/ekonomi/profil-lima-perusahaan-pemilik-izin-usaha-tambang-nikel-raja-ampat-1673538#google_vignette.

Environment Institute. 2025. “Tambang Nikel Raja Ampat: Di Pulau Kecil, Kerusakannya Bisa Lebih Besar - Environment Institute.” Enviro.or.Id. June 10, 2025. https://www.enviro.or.id/2025/06/tambang-nikel-raja-ampat-di-pulau-kecil-kerusakannya-bisa-lebih-besar/.

FERNANDYA, RA SITI SASKIA, and PUJI ASTUTI. n.d. “POLA KEMITRAAN NON GOVERNMENT ORGANIZATION (NGO) YAYASAN SAYAP IBU DENGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MENGATASI ANAK HOMELESS.” *Jurnal Studi Politik Dan Pemerintahan(JPGS) UNDIP*, 1–17. https://doi.org/https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/23563/21461 (Tersedia melalui E-Journal UNDIP).

Ginting, Inriyatni Sri Pertiwi, and Febriyanti Angelia Ginting. 2025. “Environmental Crisis in Raja Ampat Conservation Area: A Geospatial Study and Environmental Ethics Perspective.” *Geographica: Science and Education Journal* 7 (1): 29–34. https://www.usnsj.id/index.php/geographica/article/view/2502.

Goodang. 2025. “OPINI: Trade-Off Penambangan Nikel Di Kepulauan Raja Ampat: Antara Ekonomi, Sosial, Lingkungan, Dan Pembangunan Berkelanjutan » Berita Energi & Minerba Hari Ini - RuangEnergi.Com.” Ruangenergi.Com. June 9, 2025. https://www.ruangenergi.com/opini-trade-off-penambangan-nikel-di-kepulauan-raja-ampat-antara-ekonomi-sosial-lingkungan-dan-pembangunan-berkelanjutan/.

Greenpeace Indonesia. 2018. “Kedatangan Rainbow Warrior Merajut Asa Untuk

Memulihkan Alam Indonesia - Greenpeace Indonesia - Greenpeace Indonesia." Greenpeace.Org. March 7, 2018. https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1111/kedatangan-rainbow-warrior-merajut-asa-untuk-memulihkan-alam-indonesia/.

———. 2022. "Raja Ampat: Wisata Ikonis Atau Galeri Tambang Nikel? - YouTube." Youtube.Com. June 2022. https://www.youtube.com/watch?v=7POMit8jnDA.

———. 2025a. "Lindungi Raja Ampat Sepenuhnya - Greenpeace Indonesia." Greenpeace.Org. 2025. https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/63103/lindungi-raja-ampat-secara-penuh-dan-permanen/?utm_sourcE.

———. 2025b. "Wajah Lain Raja Ampat Dan Potret Tanah Papua Terkini! - YouTube." Youtube.Com. May 2025. https://www.youtube.com/watch?v=PIx5-EQIKFo.

———. 2025c. "#SaveRajaAmpat - Greenpeace Indonesia." Greenpeace.Org. June 2025. https://www.greenpeace.org/indonesia/petitions/save-raja-ampat/?utm_source=perplexity#section-cta-desktop-pH26PcMMif.

———. 2025d. "Kritik Industrialisasi Nikel, Aktivis Greenpeace Gelar Aksi Di Konferensi Nikel Internasional Di Jakarta - Greenpeace Indonesia." Greenpeace.Org. June 3, 2025. https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/63070/aktivis-greenpeace-aksi-di-konferensi-nikel-internasional/.

———. 2025e. "Melindungi Surga Terakhir - Greenpeace Indonesia." Greenpeace.Org. June 12, 2025. https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/63138/.

———. 2025f. "Surga Yang Hilang? - Greenpeace Indonesia." Greepeaece.Org. June 12, 2025. https://www.greenpeace.org/indonesia/laporan/63114/surga-yang-hilang/.

———. 2025g. "Greenpeace Dan Anak Muda Adat Papua Di MIWF 2025 - Greenpeace Indonesia." Greenpeace.Org. June 27, 2025. https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/63696/cerita-cerita-dari-perbatasan-yang-liar-anak-muda-adat-papua-di-miwf-2025/.

———. 2025h. "Forest Defender Camp 2025 - Greenpeace Indonesia." Https://Www.Greenpeace.Org/. September 2025. https://www.greenpeace.org/indonesia/forest-defender-camp-2025/.

———. 2025i. "Greenpeace Asia Tenggara Bawa Cerita #SaveRajaAmpat Ke Forum PBB, Desak Tata Kelola Nikel - Greenpeace Indonesia - Greenpeace Indonesia." Greenpeace.Org. September 8, 2025.

https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/65053/greenpeace-asia-tenggara-bawa-cerita-saverajaampat-ke-forum-pbb-desak-tata-kelola-nikel/.

Hukum Online. 2025. “Pemerintah Cabut Izin 4 Perusahaan Tambang Nikel, Keputusan Tepat Demi Kelestarian Alam.” Hukumonline.Com. June 10, 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-cabut-izin-4-perusahaan-tambang-nikel--keputusan-tepat-demi-kelestarian-alam-lt6847dfbd1157a.

Ikbal Asra, Muhammad. 2025. “Betahita | Aliansi Jaga Alam Raja Ampat Tolak Tambang Nikel.” January 24, 2025. https://betahita.id/news/detail/11121/aliansi-jaga-alam-raja-ampat-tolak-tambang-nikel.html?v=1748342235.

Indah, Putri. 2025. “KLHK Segel Tambang Nikel PT ASP Di Raja Ampat: Cemari Lingkungan Dan Rusak Ekosistem Laut.” Radarpena.Co.Id. June 10, 2025. https://radarpena.co.id/news/read/207534/klhk-segel-tambang-nikel-pt-asp-di-raja-ampat-cemari-lingkungan-dan-rusak-ekosistem-laut.

Jaring Nusa. 2025. “Raja Ampat Terancam Tambang Nikel, Greenpeace Tekan Negara Asia Pasifik Di Forum UNEP - Jaring Nusa KTI.” Jaringnusa.Id. September 15, 2025. https://jaringnusa.id/raja-ampat-terancam-tambang-nikel-greenpeace-tekan-negara-asia-pasifik-di-forum-unep/.

Jong, Hans Nicholas. 2022. “Legal Defeats Pile up for Palm Oil Companies Stripped of Permits in Papua.” Mongabay.Com. May 31, 2022. https://news.mongabay.com/2022/05/legal-defeats-pile-up-for-palm-oil-companies-stripped-of-permits-in-papua/.

Kementerian Lingkungan Hidup. 2025. “Menteri LH Tindak Tegas Tambang Nikel Di Raja Ampat.” Kemenlh.Go.Id. 2025. https://kemenlh.go.id/news/detail/menteri-lh-tindak-tegas-tambang-nikel-di-raja-ampat-lindungi-pusat-keanekaragaman-hayati-dunia.

Kompas. 2025. “Pulau Manuran Raja Ampat Keruh Karena Tambang Nikel PT ASP, KLH Lakukan Penyegelan.” Kompas.Com. June 8, 2025. https://www.kompas.com/sulawesi-selatan/read/2025/06/08/203209988/pulau-manuran-raja-ampat-keruh-karena-tambang-nikel-pt-asp-klh.

KompasTV Jambi. 2025. “FULL Terungkap Kejanggalan Izin Tambang Nikel Raja Ampat Satu Meja - YouTube.” https://www.youtube.com/watch?v=yQ4ey1mrdhA.

Laia, Kennial. 2025. “Betahita | Tambang Nikel Di Raja Ampat Ancam Ekologi Laut Dan Darat.” Betahita.Id. September 26, 2025. https://betahita.id/news/detail/11446/tambang-nikel-di-raja-ampat-ancam-ekologi-laut-dan-darat.html?v=1760656955.

Lewis, David, and Nazneen Kanji. 2009. *Non-Governmental Organisations and Development*. *International Journal of Water Resources Development*. Vol. 26. https://doi.org/10.1080/07900627.2010.519527.

Lumbanrau, Raja Eben. 2025. "Raja Ampat: Kisah Perempuan Papua Di Balik Peristiwa Viral Save Raja Ampat - BBC News Indonesia." BBC.COM. June 11, 2025. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g3l2x23plo?

Maspul, Kurniawan Arif. 2025. "Sacrificing Paradise: Indonesia's Green Energy Ambitions and the Future of Raja Ampat." *Journal of Environmental Economics and Sustainability* 2 (3): 22. https://doi.org/10.47134/jees.v2i3.711.

Maulana, Irfan. 2025. "Tambang Nikel Di Raja Ampat Rusak Pesisir Dan Terumbu Karang." Mongabay.Co.Id. October 9, 2025. https://mongabay.co.id/2025/10/09/tambang-nikel-di-raja-ampat-rusak-pesisir-dan-terumbu-karang/.

Maulana, Irfan, and Yulia Adiningsih. 2025. "PT Gag Nikel Operasi Lagi, Tanda Bahaya Bagi Raja Ampat?" Mongabay.Co.Id. September 16, 2025. https://mongabay.co.id/2025/09/16/pt-gag-nikel-operasi-lagi-tanda-bahaya-bagi-raja-ampat/.

Neo Energy. 2024. "Nikel Berperan Penting Dalam Mewujudkan Masa Depan Yang Lebih Ramah Lingkungan." Neoenergy.Co.Id. December 17, 2024. https://neoenergy.co.id/nikel-berperan-penting-dalam-mewujudkan-masa-depan-yang-lebih-ramah-lingkungan.

Noris, Steven. 2025. "Dampak Penambangan Nikel Terhadap Ekosistem Laut Raja Ampat: Ancaman Bagi Keanekaragaman Hayati Dan Masyarakat Lokal – Character Building." Binus.Ac.Id. March 6, 2025. https://binus.ac.id/character-building/2025/03/dampak-penambangan-nikel-terhadap-ekosistem-laut-raja-ampat-ancaman-bagi-keanekaragaman-hayati-dan-masyarakat-lokal/.

Nurhadi. 2025. "Ini Isi Deklarasi Sira, Hasil Forest Defender Camp 2025 Di Papua | Tempo.Co." Tempo.Co. September 27, 2025. https://www.tempo.co/lingkungan/ini-isi-deklarasi-sira-hasil-forest-defender-camp-2025-di-papua-2073884.

Nurhidayat, Despian. 2025. "Greenpeace Raja Ampat Harus Dilindungi Dan Dijauhkan Dari Aktivitas Tambang." MediaIndonesia.Com. May 12, 2025. https://mediaindonesia.com/humaniora/781738/greenpeace-raja-ampat-harus-dilindungi-dan-dijauhkan-dari-aktivitas-tambang#google_vignette.

Octavia, Shela, and Novianti Setuningsih. 2025. "Greenpeace Ungkap Adanya Tambang Nikel Di Pulau-Pulau Kecil Di Raja Ampat." Kompas.Com. June 2025. https://nasional.kompas.com/read/2025/06/07/10331441/greenpeace-

ungkap-adanya-tambang-nikel-di-pulau-pulau-kecil-di-raja-ampat.

Pangestu, Oscar Dwi, and Yusmar Yusuf. 2025. “Tambang Nikel Raja Ampat: Ancaman Kenanekaragaman Hayati Atau Ancaman Pengangguran Baru?” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4 (3): 1536–41. https://doi.org/10.38035/jim.v4i3.1145.

Pasa, Kresensia Kurniaati Mala. 2023. “Kampanye Hutan Adat, Greenpeace Dan Pioner Tanah Papua Ajak Pemuda Di Manokwari Nobar Film Amber - Tribunpapuabarat.Com.” Papuabarat.Tribunnews.Com. August 30, 2023. https://papuabarat.tribunnews.com/2023/08/30/kampanye-hutan-adat-greenpeace-dan-pioner-tanah-papua-ajak-pemuda-di-manokwari-nobar-film-amber.

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. 2025. “Greenpeace Indonesia Ajak PGI Untuk Terus Mengawal Pelestarian Lingkungan Di Raja Ampat - PGI.OR.ID.” Pgi.or.Id. June 26, 2025. https://pgi.or.id/news/warta-pgi/greenpeace-indonesia-ajak-pgi-untuk-terus-mengawal-pelestarian-lingkungan-di-raja-ampat-27.

Pili. 2023. “Tradisi Sasi Dan Kabus Di Raja Ampat – PILI Green Network.” Pili.or.Id. February 1, 2023. https://pili.or.id/tradisi-sasi-dan-kabus-di-raja-ampat/.

Pohan, K. N. K., R. Apasha, R. Sizdah, N. Nurdin, and F. Jumaynah. 2025. “Politik Agraria Laut Dan Kontestasi Tata Ruang Di Raja Ampat: Analisis Konflik Tambang Dalam Kawasan Konservasi.” *Indonesian Journal of Public Administration Review* 3 (1): 14–14. https://journal.pubmedia.id/index.php/par/article/view/5226.

Prihatin, Zintan, and Yunato Wiji Utomo. 2025. “Tambang Nikel Raja Ampat: Di Pulau Kecil, Kerusakannya Bisa Lebih Besar.” Lestari.Kompas.Com. June 10, 2025. https://lestari.kompas.com/read/2025/06/10/110300586/tambang-nikel-raja-ampat--di-pulau-kecil-kerusakannya-bisa-lebih-besar-?page=all.

Rachman, Myesha Fatina. 2025. “Alasan Mengapa Greenpeace Menolak Tambang Di Raja Ampat | Tempo.Co.” Tempo.Co. 2025. https://www.tempo.co/lingkungan/alasan-mengapa-greenpeace-menolak-tambang-di-raja-ampat-1653059.

Rahma, Alferin, Kresnha Cahya Abdynegara, Mohammad Luthfi, and Gabriella Erica Hardiyan. 2025. “MENJAGA RAJA AMPAT DARI ANCAMAN NIKEL DEMI SURGA TERAKHIR INDONESIA.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 9 (8): 2025.

Redaksi Ekuatorial. 2025. “Gelombang Penolakan Tambang Nikel Di Raja Ampat.” April 30, 2025. https://www.ekuatorial.com/2025/04/gelombang-penolakan-

tambang-nikel-di-raja-ampat/.

Riyanto, Galuh Putri, and Reska K. Nistanto. 2025. “Dari Hijau Ke Coklat, Citra Satelit Ungkap Perubahan Pulau Gag Akibat Tambang Nikel Raja Ampat.” Tekno.Kompas.Com. June 9, 2025. https://tekno.kompas.com/read/2025/06/09/14030087/dari-hijau-ke-coklat-citra-satelit-ungkap-perubahan-pulau-gag-akibat-tambang.

Ruhmana, Uma. 2025. “Komite III DPD RI Beri Atensi Keluhan Masyarakat Raja Ampat Soal Tambang Nikel Yang Berpotensi Ancam Lingkungan Dan Sektor Pariwisata - Jaga Indonesia.” Jagaindonesia.Com. May 19, 2025. https://www.jagaindonesia.com/komite-iii-dpd-ri-beri-atensi-keluhan-masyarakat-adat-soal-tambang-nikel-yang-berpotensi-ancam-lingkungan-dan-sektor-pariwisata/.

Rumandi, Anton. 2025. “Menteri LH Dan Kepala BPLH Tegaskan Komitmen Lingdungi Raja Ampat Dari Dampak Penambangan Nikel.” 2025. https://kemenlh.go.id/news/detail/menteri-lhkepala-bplh-tegaskan-komitmen-lindungi-raja-ampat-dari-dampak-penambangan-nikel.

Safwan. 2025. “Belum Diakui Sebagai Masyarakat Hukum Adat, Warga Kampung Gag Minta Pemetaan Wilayah Di Raja Ampat - Tribunsorong.Com.” Sorong.Tribunnews.Com. June 16, 2025. https://sorong.tribunnews.com/2025/06/16/belum-diakui-sebagai-masyarakat-hukum-adat-warga-kampung-gag-minta-pemetaan-wilayah-di-raja-ampat.

Salmah, Lidya. 2025. “Mahasiswa Papua Barat Daya Bergerak: Tolak Tambang Raja Ampat, Desak Pemerintah Libatkan Pemuda! - Tribunpapuatengah.Com.” June 12, 2025. https://papuatengah.tribunnews.com/2025/06/12/mahasiswa-papua-barat-daya-bergerak-tolak-tambang-raja-ampat-desak-pemerintah-libatkan-pemuda.

Sani, Hendra, and Syamsuddin Syamsuddin. 2025. “Konflik Penambangan Nikel Di Raja Ampat: Analisis Etika Lingkungan Dan Rekayasa Pertambangan Untuk Konservasi Berkelanjutan.” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4 (2): 3453–61. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1041.

Santioso, Caludia Marcia Anastasia, and Melpayanty Sinaga. 2025. “GREENPEACE’S TRANSNATIONAL ADVOCACY STRATEGIES AGAINST NICKEL MINING IN RAJA AMPAT.” *Journal of Global Studies* 3 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.59408/bjgs.v3i2.256.

Saputra, Ernandhi Hutomo. 2025. “Tambang Nikel Membabat Raja Ampat | Kumparan.Com.” Kum[Paran.Com. June 17, 2025. https://kumparan.com/kumparannews/tambang-nikel-membabat-raja-ampat-25HYarYIWB3.

Savitri, Santhi Pradayini, M.A I Made Anom Wiranata, S.IP, and Putu Titah Kawitri Resen. 2015. “Upaya The Nature Conservancy Dalam Konservasi.” *Jurnal Harian Regional* 1: 14. https://jurnal.harianregional.com/hi/id-11510.

Silehu, M Iqbal, and Cekli Setya Pratiwi. 2025. “Polemik Tambang Nikel Di Pulau Gag Raja Ampat : Ditinjau Dari Perspektif Positivisme Hukum.” *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 5 (1): 1–25. https://doi.org/10.59259/ab.v5i1.232.

Sommaliagustina, Desi. 2025. “Suku Adat Menentang Tambang Raja Ampat – Portal Hukum.” Portalhukum.Id. June 15, 2025. https://portalhukum.id/opini-hukum/suku-adat-menentang-tambang-raja-ampat/.

Supiyanto, Sony. 2025. “Aktivis Greenpeace Gelar Aksi Kritik Industrialisasi Di Konferensi Nikel Internasional - Aksi Lingkungan ID.” Aksilingkungan.Id. June 4, 2025. https://aksilingkungan.id/aktivis-greenpeace-gelar-aksi-kritik-industrialisasi-di-konferensi-nikel-internasional/.

Syahrani, Mela. 2025. “Profil Kawei Sejahtera, Tambang Raja Ampat Dipimpin Eks Menteri Freddy Numberi - Energi Katadata.Co.Id.” Katadata.Co.Id. June 16, 2025. https://katadata.co.id/berita/energi/684fda4abb5b3/profil-kawei-sejahtera-tambang-raja-ampat-dipimpin-eks-menteri-freddy-numberi.

Takdir. 2022. “Kehadiran Tambang Nikel Di Raja Ampat Membawa Dampak Ekonomi Di Masa Pendemi.” February 22, 2022. https://www.tvonenews.com/daerah/regional/29670-kehadiran-tambang-nikel-di-raja-ampat-membawa-dampak-ekonomi-di-masa-pendemi?page=1.

Tri Sulistiyono, Seno. 2025. “Di Balik Kekuatan PT Kawei Sejahtera, Penambang Nikel Raja Ampat Dicabut Izinnya, Ada Sosok Ini - TribunNews.Com.” M.Tribunnews.Com. June 17, 2025. https://m.tribunnews.com/bisnis/2025/06/17/di-balik-kekuatan-pt-kawei-sejahtera-penambang-nikel-raja-ampat-dicabut-izinnya-ada-sosok-ini.

Ulat, Muhamad Ali, Handayani Handayani, Anjar Mulya, Hendra Poltak, and Ismail Ismail. 2024. “Analysis of the Social, Economic, and Ecological Impact of Mining Activities of PT. Gag Nickel on Society and Coral Reef Ecosystem in Gag Island, Raja Ampat District.” *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 3 (10): 3731–46. https://doi.org/10.55927/fjmr.v3i10.11612.

Yulianto, Yuda. 2025. “Tambang Nikel Di Raja Ampat, Ancaman Nyata Terhadap Masyarakat Adat Dan Keadilan Sosial - Media Dosen Indonesia.” Mediadosen.Id. June 2025. https://mediadosen.id/tambang-nikel-di-raja-ampat-ancaman-nyata-terhadap-masyarakat-adat-dan-keadilan-sosial/.